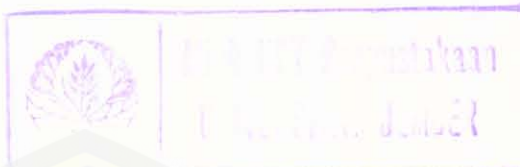


PROSEDUR PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
ATAS JASA REKANAN BIDANG PENGADAAN MATERIAL
di PT. PLN (Persero) DISTRIBUSI JAWA TIMUR
CABANG BANYUWANGI

LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA



Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Ahli Madya (A.Md) Perpajakan
Program Studi Diploma III Perpajakan
Jurusan Ilmu Administrasi
Pada
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER



S
Klass
336-2
FIK
P
16 JUL 2001
62236135

Oleh :

Hifdoh Fikriyah

NIM. 980903101048

Pembimbing :

Drs. Bb. BUDYANTORO KREBET DS, MS

NIP. 130 220 643

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
2001

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

PERSETUJUAN

Telah di setujui Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

N a m a : HIFDOH FIKRIYAH
N.I . M. : 980903101048
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan
Judul : Prosedur Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
Atas Jasa Rekanan Bidang Pengadaan Material
di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur
Cabang Banyuwangi

Jember, 27 April 2001

Menyetujui,
Dosen Pembimbing

Drs. Bb. BUDYANTORO KREBET DS, MS

NIP.130 220 643

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

PENGESAHAN

Telah dipertahankan dihadapan Sidang Panitia Penguji Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember :

Nama : **HIFDOH FIKRIYAH**
NIM : 980903101048
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan

Prosedur Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
Atas Jasa Rekanan Bidang Pengadaan Material
di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur
Cabang Banyuwangi

Hari : Selasa
Tanggal : 08 Mei 2001
Jam : 16.00 WIB.
Bertempat : Di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Dan telah dinyatakan **LULUS**
Panitia Penguji

Anggota



Drs. H. FADHOLI SA'ID, SU
NIP. 130 531 977

Ketua,


Drs. Bb. BUDYANTORO KREBET DS, MS
NIP. 130 220 643

Mengesahkan,
Universitas Jember
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dekan


Drs. H. MOCH. TOERKI
NIP. 130.524.832



PERSEMBAHAN

1. Ayahanda Agus Humaidi dan Ibunda Fatmah Faqieh, serta Ibu Sri Neni dan Bapak Hariyono yang arif, dan telah mengasuh, membimbing, dan mendidik dengan segala cinta dan do'a yang terus mengalir dalam setiap lisan dan hati disetiap sujudmu.
2. Kakakku tercinta “Mbak Lya” dan adik – adikku tersayang “Ardan, Afan, Heni dan Dewi” terima kasih atas kasih sayang dan dukungan serta hari –hari manisnya.
3. Some One in My Heart, yang telah membantu dan mendukung untuk menyelesaikan laporan akhir ini.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya yang juga memberikan kekuatan tersendiri kepada penulis. Sehingga penulis mampu menyelesaikan laporan Akhir ini dengan judul "Prosedur Pengenaan PPN atas jasa Rekanan Bidang Pengadaan Material di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Banyuwangi".

Adapun penulisan laporan akhir ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya (A. Md.) pada Program Studi Diploma III Perpajakan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

Selanjutnya penulis mengucapkan terimakasih dan penghormatan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Drs. H. Moch Toerki, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.
2. Bapak Drs. Agus Budihardjo, MA, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi.
3. Bapak Drs. Sasongko, M.Si, selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.
4. Bapak Drs. B. Budyantoro Krebet DS, MS, selaku dosen pembimbing yang berkenan memberikan banyak arahan dan bimbingan selama penyusunan laporan akhir ini.
5. Bapak Drs. H. Fadholi Sa'id, SU, selaku Dosen wali yang selalu memberikan nasehat, bimbingan dan pengarahan.
6. Bapak Suwandoro ,BE, selaku Kepala Cabang PT. PLN (Persero) Cabang Banyuwangi yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan praktek kerja nyata di PLN Cabang Banyuwangi.

7. Seluruh staf dan karyawan PT. PLN (Persero) Cabang Banyuwangi khususnya seksi kepegawaian (Bpk. Umar Faruk dan staf), seksi pelayanan pelanggan (Bpk. Wahyudi, Ashari, Hadiyono, Marshall), seksi perencanaan distribusi (Bpk. Made dan staf) serta seksi anggaran dan keuangan (Bpk. Handoko, Tafin,, Sofyan, Ervin).
8. Rekan-rekan PKN “Herman, Adi, Tila, Indah, Ricky, Rangga, Dian, Putu, Nely” terima kasih atas kerjasama dan bantuannya selama proses PKN, sera teman-teman seangkatan (Pajak '98)
9. Teman-temanku di Jawa VI/74 (Gita, Nurul, Riza, Rani, Ari, Titis,Aning, Mbak Iva) dan semuanya yang selalu memberikan dukungan.
10. Civitas Akademika Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember dan Almamaterku tercinta.

Penulis menyadari bahwasanya dalam penulisan laporan akhir ini masih banyak terdapat kekurangan dan kekhilafan. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan, demi kesempurnaan laporan akhir ini. Akhirnya penulis berharap agar laporan akhir ini berguna bagi semua pihak.

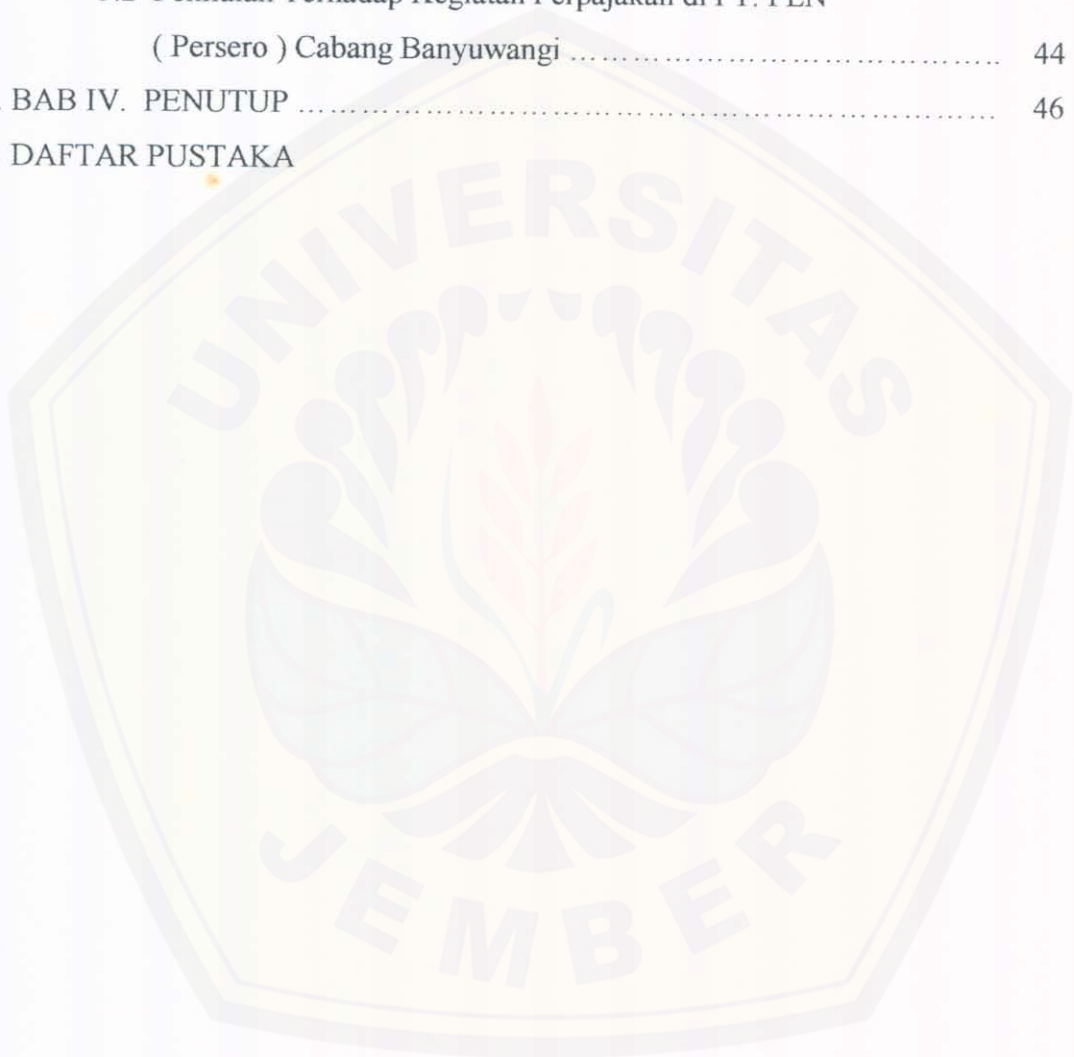
Jember, April 2001

Penulis

Daftar Isi

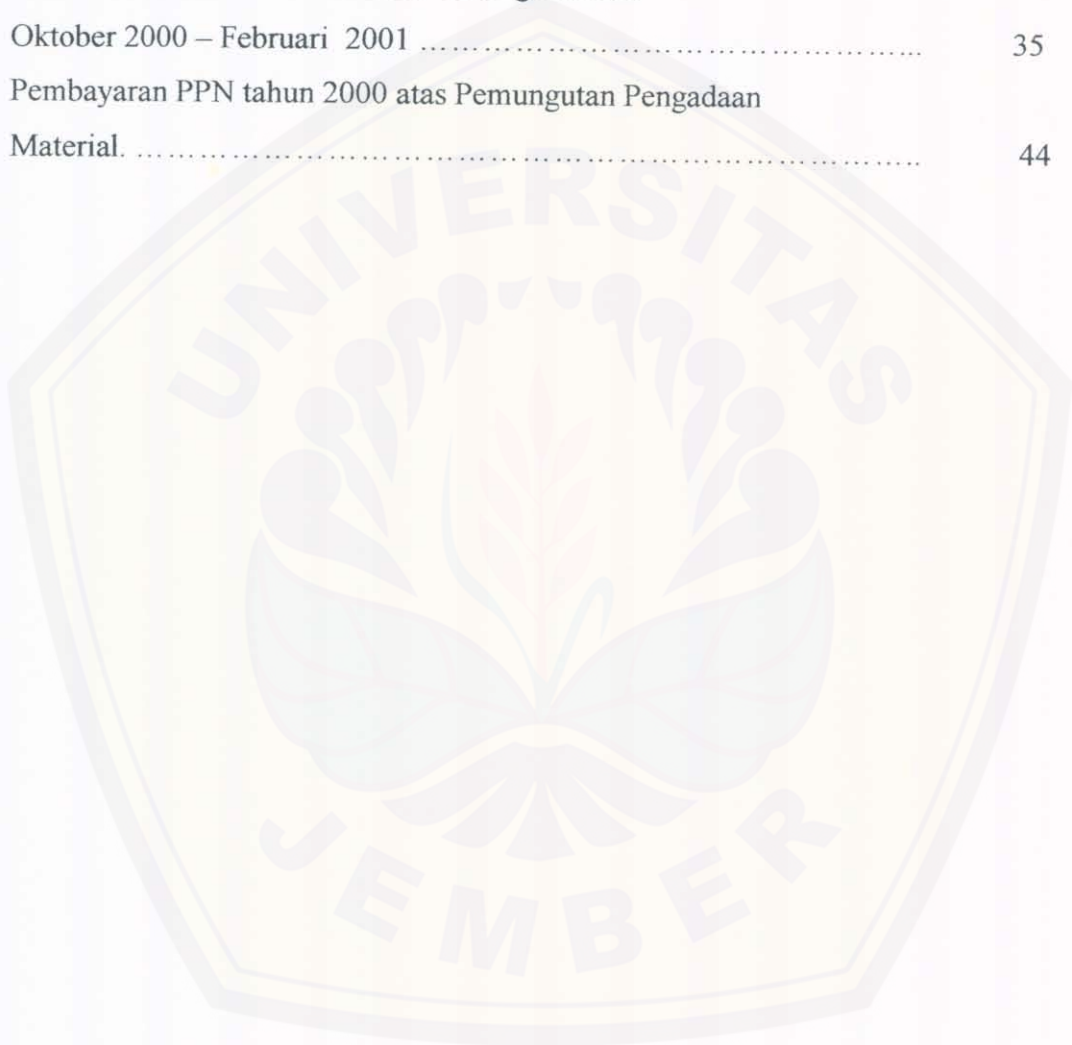
	Halaman
1. Halaman Judul	i
2. Halaman Pengesahan	ii
3. Halaman Persetujuan	iii
4. Halaman Persembahan	iv
5. Kata Pengantar	v
6. Daftar Isi	vii
7. Daftar Tabel	ix
8. Daftar Gambar	x
9. Daftar lampiran	xi
10. BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan dan Kegunaan	3
1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata	3
1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata	3
11. BAB II. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	
2.1 Sejarah Berdirinya PT. PLN (Persero)	5
2.1.1 Perkembangan PT. PLN (Persero) di Indonesia	5
2.1.2 Latar Belakang Sejarah PT. PLN (Persero)	7
2.1.3 Sejarah Hari Listrik	12
2.2 Struktur Organisasi	14
2.3 Personalia	27
2.4 Tugas Sumber Data Utama	27
12. BAB III. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA	
3.1 Diskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	28
3.1.1 Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	28
3.1.2 Jangka Waktu, Obyek dan Tempat PKN	

3.1.2.1	Jangka waktu PKN	30
3.1.2.2	Obyek PKN	30
3.1.2.3	Tempat PKN	31
3.1.3	Hasil Praktek Kerja Nyata	31
3.2	Penilaian Terhadap Kegiatan Perpajakan di PT. PLN (Persero) Cabang Banyuwangi	44
13.	BAB IV. PENUTUP	46
14.	DAFTAR PUSTAKA	



Daftar Tabel

	Halaman
1. Tarif Dasar Listrik Biaya Penyambungan	33
2. Tarif Dasar Listrik Uang Jaminan Pelanggan Pola – B	34
3. Jumlah Rekanan dan Klasifikasi Golongan bulan Oktober 2000 – Februari 2001	35
4. Pembayaran PPN tahun 2000 atas Pemungutan Pengadaan Material	44



Daftar Gambar

1. Struktur Organisasi PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Banyuwangi
2. Pembagian Material PT. PLN (Persero) untuk Saluran Listrik Tegangan Rendah



Daftar lampiran

1. Surat Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata
2. Surat Tugas Praktek Kerja Nyata
3. Daftar Kegiatan Konsultasi Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata
4. Nilai Praktek Kerja Nyata
5. Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata
6. Surat Penunjukan Kerja
7. Surat Permintaan Penawaran Harga
8. Surat Penawaran Harga
9. Rekapitulasi RAB
10. RAB Pemasangan Jaringan Tegangan Rendah
11. Surat Jalan
12. Berita Acara Pemeriksaan Barang/Spare Part (TUG. 4)
13. Laporan Penerimaan Barang (Kode 2)
14. Berita Acara Pembayaran
15. Laporan Pemungutan PPN/PPnBM
16. Faktur Pajak Standart

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dimasa ini, saat negara sedang dalam masa pembangunan guna menciptakan tatanan kehidupan ekonomi yang baik, sesuai dengan landasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, tentunya banyak sekali dana yang dibutuhkan. Salah satu dana yang terbesar yang dimiliki oleh negara kita berasal dari sektor Migas, tetapi karena sektor ini merupakan sumberdaya yang tidak dapat diperbaharui maka negara berusaha mendapatkan sumber dana dari sektor yang lain, salah satunya pajak sebagai sumber Non Migas dan dapat diperbaharui. Saat ini pajak sebagai primadona penyumbang dana terbesar dalam APBN, diharapkan pula mampu mengatur kondisi ekonomi bangsa sesuai dengan fungsinya yaitu Budgeter dan Reguler. Pajak negara berasal dari objek-objek pajak diantaranya dari penghasilan, penyerahan jasa dan lain-lain.

Sejalan dengan perkembangan Negara, maka tumbuhlah instansi-instansi di Indonesia, yang mana di harapkan dengan bertumbuhnya instansi tersebut dana untuk pembiayaan pembangunan juga bertambah, karena dana ini berasal dari investasi instansi dan masyarakat. Pelaksanaan investasi berdasarkan pada kemampuan dan kesanggupan dari instansi dan masyarakat Indonesia. Pajak yang dibayarkan untuk kas negara bisa berasal dari orang pribadi dan badan, karena pajak merupakan wujud nyata dari partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Begitu juga dengan instansi baik BUMN, BUMS yang tidak pernah lepas dari kewajiban perpajakan, mengingat ke duanya sebagai wajib pajak.

Menurut Undang-Undang Perpajakan Nomor 9 tahun 1994, syarat untuk menjadi wajib pajak adalah dengan mendaftarkan diri pada Kantor Direktorat Jendral Pajak untuk di beri Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi wajib pajak perseorangan dan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) bagi wajib pajak badan. Yang mana wajib pajak baik perseorangan ataupun wajib pajak badan mempunyai kewajiban untuk mengisi, menandatangani, dan menyampaikan SPT ke

Direktorat Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak di wilayah wajib pajak tinggal atau bertempat kedudukan.

Sedangkan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1994 Pasal 3 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang mengatakan bahwa wajib pajak berkewajiban untuk mengambil sendiri SPT ditempat yang telah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Meskipun kini KPP selaku wakil dari Direktorat Jenderal Pajak mengirimkan SPT tersebut lewat pos, hal ini semata-mata untuk meningkatkan efektifitas pelayanan dari Dirjen Pajak. Dalam hal pemungutan pajak, negara Indonesia memiliki sistem dan corak warna tersendiri, dari Official Assesment System berubah ke Self Assesment System, yang mana sistem ini memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan yaitu, dengan memberikan kepercayaan pada mereka untuk menghitung dan membayar sendiri pajak yang terutang serta melaporkannya secara teratur.

Alasan pelaksanaan PKN (praktek kerja nyata) pada PT. PLN (Persero) Cabang Banyuwangi karena PT. PLN (Persero) Cabang Banyuwangi merupakan subjek pajak yang telah terdaftar sebagai wajib pajak badan dengan di perolehnya NPWP (Nomor Pokok wajib Pajak) sebagai identitas wajib pajak, sejak tanggal 1 Oktober 1995. Hal ini berarti PT. PLN (Persero) Cabang Banyuwangi mempunyai kewajiban untuk menghitung, menyetor dan melaporkan besarnya PPh (Pajak Penghasilan), PPN (Pajak Pertambahan Nilai) yang terutang sesuai dengan sistem Self Assesment.

Berdasarkan Undang-Undang dan Keputusan diatas PT PLN (Persero) Cabang Banyuwangi selaku Wajib Pajak, dirasa sangatlah perlu menetapkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan yang berperan serta dalam pembiayaan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu, disini penulis ingin melaporkan bagaimana pelaksanaan kegiatan perpajakan di PT PLN (Persero) Cabang Banyuwangi, khususnya Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan atas jasa rekanan bidang pengadaan material. Pemilihan judul ini disebabkan adanya dua Pajak

Pertambahan Nilai yang harus dibayarkan oleh PT. PLN, yang mana untuk PPN yang dipungut atas jasa pengadaan material ini tidak rutin setiap bulannya, melainkan jika ada kontrak dengan rekanan saja. Uraian tentang prosedur pengenaan PPN atas jasa rekanan bidang pengadaan material secara terinci akan diuraikan dalam laporan ini, baik dari pengenaan, pelaporan, serta pembayaran PPN sesuai dengan sistem self assesment.

1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata

1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata

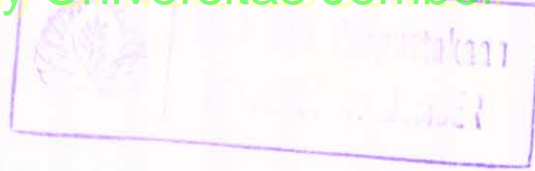
Seperti kita ketahui bahwa setiap penulisan Karya Ilmiah selalu mempunyai tujuan dan manfaat tertentu, begitu juga dengan penulisan laporan ini penulis bertujuan antara lain:

1. Memperdalam pengetahuan penulis dalam bidang perpajakan, khususnya yang berkenaan dengan masalah pengenaan PPN atas jasa rekanan bidang pengadaan material di PT. PLN (Persero) Cabang Banyuwangi
2. Ingin mendapatkan gambaran tentang sistem Self Aessment yang dilakukan PT. PLN (Persero) Cabang Banyuwangi selaku wajib pajak.
3. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md.) Perpajakan di Universitas Jember.

1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata

Dengan penulisan laporan akhir ini diharapkan mempunyai manfaat baik bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya. Oleh karena itu, penulisan laporan ini bertujuan untuk :

1. Menambah wawasan dan pengetahuan bidang perpajakan, khususnya yang berkenaan dengan PPN atas jasa rekanan bidang pengadaan material
2. Memberikan gambaran tentang pelaksanaan sistem Self Aessment.



II. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 SEJARAH BERDIRINYA PT PLN (Persero)

2.1.1 Perkembangan PT PLN (Persero) di Indonesia

Ketenagalistrikan di Indonesia dimulai pada akhir abad ke - 19, ketika beberapa perusahaan Belanda mendirikan pembangkit tenaga listrik untuk keperluan sendiri. Perusahaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dimulai sejak perusahaan swasta Belanda NV. NIGM memperluas usahanya dibidang tenaga listrik, yang semula hanya bergerak dibidang gas dan kemudian berubah menjadi NV. ANIEM, NV. GESEO dan lainnya termasuk perusahaan pemerintah Hindia Belanda.

Selama pendudukan Jepang, semua perusahaan listrik dan gas Belanda dikuasai oleh Jepang, dan setelah diproklamirkannya kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, perusahaan-perusahaan tersebut direbut oleh pemuda-pemuda Indonesia pada bulan september 1945, selanjutnya diserahkan kepada pemerintah Republik Indonesia.

Pada tanggal 27 oktober 1945 dibentuk Jawatan Listrik dan Gas, yang selanjutnya diperingati hari listrik nasional. Pada saat itu kapasitas terpasang pembangkit tenaga listrik hanyalah sebesar 157,5 MW. Sejak agresi militer Belanda, perusahaan listrik swasta Belanda kembali dikuasai oleh pemiliknya kecuali perusahaan NV. ANIEM, dan beberapa perusahaan diambil alih kembali mulai tanggal 3 oktober 1953 kemudian digabungkan kedalam Jawatan Tenaga Listrik. Jawatan Tenaga Listrik tersebut membawahi perusahaan negara untuk pembangkitan dan perusahaan negara untuk distribusi tenaga listrik. Jawatan tenaga yang telah disempurnakan menjadi Penguasa Perusahaan Listrik dan Gas (P3LG) pada tahun 1958.

Pada tanggal 1 Januari 1961, didirikan sebuah perusahaan negara yang bergerak dalam bidang ketenagaan listrik, gas dan kokas dengan nama Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara (BPU – PLN).

Tanggal 28 September 1964 BPU-PLN dibubarkan dan dibentuk dua perusahaan negara yaitu Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang mengelola tenaga listrik dan Perusahaan Gas Negara (PGN). Pada saat itu pembangkit tenaga listrik PLN sebesar kurang lebih 300 MW. Tahun 1972 pemerintah Indonesia untuk pertama kali menetapkan status Perusahaan Listrik Negara sebagai Perusahaan umum Listrik Negara (PLN) dan tahun 1990 PLN ditetapkan sebagai pemegang kuasa usaha ketenagalistrikan.

Sebagai pembina teknis untuk PLN, dilakukan oleh Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik. Mulai tahun 1978, pembina teknis PLN dialihkan ke Departemen Pertambangan dan Energi dibantu Direktorat Jenderal Ketenagaan, yang kemudian pada kabinet pembangunan IV dirubah menjadi Direktorat Jenderal Listrik dan Pengembangan Listrik dan Pengembangan Energi dengan fungsi sebagai berikut :

- 1) Pemberdayaan program kelistrikan
- 2) Pemberdayaan program pengusaha kelistrikan
- 3) Pengembangan energi baru

Dari uraian diatas, terlihat bahwa tugas pemerintah yang semula dipikul oleh PLN secara bertahap dikembalikan kepada pemerintah (Departemen), sehingga PLN dapat lebih memusatkan fungsinya sebagai perusahaan.

Sejak tahun 1992, pemerintah memberikan kesempatan kepada sektor swasta untuk bergerak dalam bisnis penyediaan tenaga listrik. Sejak saat itu PLN bukan satu-satunya perusahaan yang menyediakan tenaga listrik untuk umum. Sejalan kebijakan diatas, pada bulan juni 1994 status PLN dialihkan dari Perusahaan Umum (Perum) menjadi Perusahaan perseroan (Persero).

Untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik yang bertambah rata-rata 15 % pertahun, PLN akan terus menambah, jumlah pembangkit tenaga listrik serta jaringan transmisi dan distribusi. Untuk itu PLN membutuhkan dana investasi Rp. 8 sampai 10 triliun pertahun. Mengingat jumlahnya yang demikian besar, PLN akan mengupayakan dana dari berbagai sumber :

- 1) Dana dari sumber sendiri

- 2) Penanaman modal secara patungan
- 3) Pinjaman lunak
- 4) Kredit ekspor
- 5) Pasar modal

Kinerja keuangan PT. PLN pada tahun 1996 meliputi pendapatan usaha sebesar Rp.52.583,80 miliar, sedangkan perusahaannya meliputi penjualan tenaga listrik sebesar 56.932,01 GWh dengan jumlah pelanggan sebesar 21,98 juta, daya tersambung 30.549 MVA, daya terpasang pembangkit tenaga listrik sebesar 15.940 MW, jaringan transmisi sebesar 19.516 kms, jaringan distribusi sebesar 377.300 kms dan desa berlistrik sebesar 42.724 desa.

Perkembangan PLN menjadi Perusahaan persero (Persero) memungkinkan PLN untuk secara efisien, PLN memisahkan antara fungsi perkembangan ketenagalistrikan di Indonesia yaitu dengan cara

- 1) Untuk menjalankan perusahaan secara efisien, PLN memisahkan antara fungsi bisnis dan fungsi sosial dengan membentuk anak perusahaan. Tindakan ini memungkinkan patungan dengan pihak swasta yang akan menciptakan persaingan yang sehat antara perusahaan-perusahaan swasta dan anak perusahaan.

- 2) Tenaga terampil dan berpengalaman sebagai langkah pertama pada bulan Oktober 1995 PLN telah mengukuhkan pendirian dua anak perusahaan yaitu PT. PLN pembangkitan Jawa Bali I (PJB I) dan pembangkitan Jawa Bali II (PJB II).

- 3) Kedua anak perusahaan diciptakan untuk memisahkan tanggung jawab fungsi sosial. Kedua anak perusahaan tersebut memiliki keunggulan karena memiliki skala yang besar dan kinerja yang baik dengan didukung tenaga terampil dan berpengalaman.

2.1.1 Latar Belakang Sejarah PT. PLN (Persero)

Kelistrikan di Indonesia dimulai sejak tahun 1898 pada akhir abad 19 saat zaman pemerintahan Hindia Belanda. Pengelolannya pada saat itu dilakukan dan

dikembangkan oleh pemerintah Hindia Belanda dengan perusahaan listrik swasta. Adapun perkembangan perusahaan listrik negara dibagi menjadi lima periode yaitu :

a. *Periode sampai tahun 1953 (Perusahaan Listrik Hindia Belanda)*

Pembangunan kelistrikan yang dikelola daerah setempat seperti Elektriciteit Bedriff Batavia (1893), Elektriciteit Bedriff Batavia medan (1903), Elektriciteit Bedriff Surabaya (1907), dialihkan ke perusahaan swasta setelah perusahaan listrik yang berpusat di negeri Belanda didirikan di wilayah Indonesia. Pendirian listrik Belanda antara lain :

1. Tahun 1913, perusahaan listrik NV. NIGM (kemudian berubah menjadi NV. OGEM) dengan wilayah operasi meliputi Batavia (Jakarta), Meester Cornelis (Jatinegara), Tangerang, Kebayoran lama, Medan, Tanjung Karang (Lampung), Makasar (Ujung Pandang) dan Manado.
2. Tahun 1914, perusahaan listrik NV. ANIEM, dengan wilayah operasi Surabaya, Semarang, Yogyakarta, Bukittinggi, Pontianak, Ambon.
3. Tahun 1915, perusahaan listrik ELECTRA, dengan wilayah operasi Tulungagung dan sekitarnya. Dalam tahun yang sama didirikan SEM, daerah operasinya Surakarta.
4. Tahun 1923 / 1928, perusahaan listrik NV. GEBEO, dengan wilayah operasi Bandung, Bogor, serta kota seluruh Jawa Barat kecuali Cirebon dan Jakarta.
5. Tahun 1925, perusahaan listrik OJEM dengan wilayah operasinya Panarukan.
6. Tahun 1927, perusahaan listrik EMR, dengan operasinya Rembang dan Bojonegoro. Dan tahun yang sama juga membentuk S'LANDS WATERKRACIIT BEDRUVEM (LWB) yaitu Perusahaan Listrik Negara yang mengelola PLTA Plengan, PLTA Lumajang, PLTA Plengkak Dogo.
7. PLTA Ubruk dan Kracak di Jawa Barat, PLTA Giringan di Madiun, PLTA Tes di Bengkulu, PLTA Tonselama di Sulawesi Utara dan PLTU di Jakarta juga di beberapa kota praja dibentuk perusahaan-perusahaan.
8. Tahun 1939, perusahaan listrik EMB, daerah operasinya Banyumas.

b. Periode tahun 1943-1945 (Perusahaan Listrik Jaman Jepang)

Dengan menyerahnya pemerintah Belanda ke Jepang dalam perang dunia II, maka Indonesia dikuasai oleh Jepang sehingga pada masa ini perusahaan listrik swasta milik Belanda yang ada di Indonesia juga dikuasai oleh Jepang dan semua personil dalam perusahaan listrik yang ada di Jawa diganti dengan nama sebagai berikut :

1. Jawa Denki Yogyakarta berpusat di Jakarta.
2. Seibu Jawa Denki Sha untuk wilayah Jawa Barat.
3. Chobu Jawa Denki Sha untuk wilayah Jawa Tengah.
4. Tobu Jawa Denki Sha untuk wilayah Jawa Timur.

c. Periode 1945-1950

Jatuhnya Jepang ketangan Sekutu dan diploklamirkannya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, maka kesempatan ini dimanfaatkan oleh pemuda sehingga oleh seluruh perusahaan listrik diambil alih. Pada masa ini semua daerah yang dikuasai oleh pemerintah Indonesia pengelolaan perusahaan listrik, dilakukan oleh perusahaan Jawatan Listrik dan Gas. Pengambilalihan pimpinan perusahaan listrik dari penguasa Jepang secara keseluruhan dapat diselesaikan pada pertengahan bulan Oktober 1945 dan diserahkan kepada pemerintah RI. Penyerahan tersebut diterima oleh Presiden Soekarno dan kemudian dengan penetapan pemerintah tahun 1945 No. 1 / SD/ 1945 tanggal 27 Oktober 1945 dijadikan hari listrik di Indonesia dan dibentuklah Jawatan Listrik dan Gas di Yogyakarta.

Pada masa agresi militer Belanda I dan II sebagian besar perusahaan listrik dikuasai oleh pemerintah Belanda atau pemilik semula. Pegawai yang tidak mau bekerja sama, mengungsi dan menggabungkan diri pada kantor Jawatan Listrik dan gas di daerah RI yang bukan daerah pendudukan Belanda untuk meneruskan perjuangan. Para pemuda kemudian mengajukan mosi yang dikenal dengan nama mosi KOBARSJIH tentang nasionalisasi perusahaan listrik dan gas swasta parlemen RI.

d. periode 1951 – 1984

Perusahaan Listrik NV. ANIEM, NV. GEBEO, NV. OGEM, dikuasai oleh pemerintah RI dengan nama Perusahaan Listrik dibawah naungan Direktorat Jendral Ketenagaan Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga. Berdasarkan keputusan Presiden RI No : 163 tanggal 3 Oktober 1953 tentang Nasionalisasi Perusahaan Listrik bangsa Belanda, maka perusahaan listrik NV. OGEM (1 Januari 1954) dan NV. ANIEM (1 Nopember 1954) digabungkan ke Jawatan Tenaga. Kemudian dibentuk PENUDITEL (Perusaan Listrik Negara Untuk Distribusi Tenaga Listrik) dan PENUPETEL (Perusahaan Listrik Untuk Pembangkit Tenaga Listrik) dibawah naungan Direktorat Jendral Ketenagaan Kementrian PUT berdasarkan SK Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga No: 25/45/17 tanggal 23 September 1958 Jawatan Tenaga diganti dengan Perusahaan Listrik Negara . Tanggal 27 Desember 1958 DPR dan Pemerintah RI mengeluarkan Undang-Undang No: 86/58 tentang Nasionalisasi Perusahaan Listrik dan Gas milik Belanda. Berdasarkan Undang-undang No : 67/61 terbentuklah Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara (BPUPLN) yang mengelola Perusahaan Listrik dan Gas dalam satu wadah organisasi. Dalam PUT No: 9/PRT/1964/BPUPLN dibekukan tanggal 27 Oktober 1964 yang dikenal sebagai hari Listrik diperingati untuk pertama kalinya tahun 1964 (tanggal yang sama) yang bertempat digedung Badan Pekerja Komite Nasional Pusat (BPKNIP) Yogyakarta.

BPUPLN dipecah menjadi Perusahaan Listrik Negara dan Perusahaan Gas Negara berdasarkan peraturan No: 1/PRT/1965. Dengan keputusan PUTL No: 1/PRT/1973 Perusahaan Listrik Negara menjadi Perusahaan Umum Listrik Negara yang memilik wewenang merencanakan, membangun dan mendistribusikan tenaga listrik diseluruh wilayah RI. Dalam Kabinet Pembangunan III dibantu Departemen Pertambangan dan Energi, sehingga PLN dan PGN dipindahkan ke lingkungan Departemen Pertambangan dan Energi, sedangkan dibidang ketenagaan ditangani Direktorat Jenderal Ketenagaan (1981). Dalam Kabinet Pembangunan IV, Ditjen Listrik dan Energi Baru (LEB) sehingga PLN dapat memusatkan pada pembinaan program kelistrikan, pembinaan kelistrikan, pengembangan energi baru.

e. Periode 1985 sampai sekarang.

Pemerintah RI dan DPR RI menetapkan UU No: 15/1985 tentang ketenagalistrikan dan untuk penjelasan UU tersebut di tetapkan dalam PP RI No: 10/1989 tentang penyediaan dan pemanfaatan tentang tenaga listrik yang PLN merupakan salah satu pemegang kuasa usaha ketenagalistrikan serta PP RI No: 17/1990 tentang Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara dengan visi menyediakan tenaga listrik untuk kemanfaatan umum dengan meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata, mengusahakan dan keuntungan untuk membiayai pengembangan dan penyediaan tenaga listrik. Status Perusaan umum Listrik Negara berubah menjadi PT. PLN (Persero) dengan PP RI No: 23/1994 terhitung mulai tanggal 1 Agustus 1994 dengan perubahan visi perusahaan berorientasi pada langganan, serta orientasi menjadi perusahaan yang efisien, tumbuh dan berkembang, citra baik dan mandiri dan juga disahkan oleh Menteri Kehakiman No: C2.11.519.HT.01.01 Tahun 1994 serta diumumkan pada tambahan Berita Negara No: 6731/1994.

2.1.3 Sejarah Hari Listrik

Kelistrikan di Indonesia di mulai pada akhir abad ke - 19 , pada saat beberapa perusahaan Belanda , antara lain pabrik gula dan pabrik teh mendirikan beberapa pembangkit tenaga listrik untuk keperluan sendiri. Kelistrikan untuk pemanfaatan umum di mulai pada saat perusahaan swasta Belanda yaitu NV. NIGN yang semula bergerak di bidang gas memperluas usahanya di bidang listrik untuk kemanfaatan umum .

Pada tahun 1927 pemerintah membentuk s'Lands Waterkracht Bedrijven (LWB) yaitu Perusahaan listrik Negara yang mengelola PLTA Piengan , PLTA Lamajang , PLTA Bengkok Dado, PLTA Ubrug dan kracak di Jawa Barat , PLTA Giringan di Madiun , PLTA Tes di Bengkulu, PLTA Tonselama ,di Sulawesi Utara dan PLTU di Jakarta . Selain itu di beberapa Kota praja di bentuk perusahaan listrik Kotapraja. Dengan menyerahnya pemerintah Belanda kepada Jepang dalam perang Dunia II maka Indonesia dikuasai Jepang , oleh karena itu Perusahaan Listrik dan Gas yang ada diambil alih oleh Jepang dan semua personil dalam perusahaan listrik tersebut diambil oleh orang-orang Jepang .

Dengan jatuhnya Jepang ke tangan Sekutu, dan diproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, maka kesempatan yang baik ini dimanfaatkan oleh pemuda dan buruh listrik dan gas untuk mengambil alih perusahaan-perusahaan listrik dan gas yang dikuasai oleh Jepang.

Setelah berhasil merebut Perusahaan Listrik dan Gas dari kekuasaan Jepang kemudian pada bulan September 1945, delegasi dari buruh/pegawai dan gas yang diketuai oleh Kobarsjih menghadap Pimpinan KNI Pusat yang pada waktu itu diketuai oleh Mr. Kasman Singodimedjo untuk melaporkan hasil perjuangan mereka. Selanjutnya delegasi Kobarsjih dengan pimpinan KNI Pusat menghadap Presiden Sukarno dan kemudian dengan penetapan Pemerintah Tahun 1945 No. 1 SD tertanggal 27 Oktober 1945 maka dibentuklah jawatan listrik dan gas di bawah Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga.

Dengan adanya agresi Belanda I dan II sebagian besar perusahaan listrik dikuasai lagi oleh pemerintah Belanda atau pemiliknya semula. Pegawai-pegawai yang tidak mau bekerja sama kemudian mengungsi dan menggabungkan diri pada Jawatan Listrik dan Gas di daerah-daerah Republik Indonesia yang bukan daerah pendudukan Belanda untuk meneruskan perjuangan para pemuda mengajukan mosi yang dikenal dengan mosi Kobarsih tentang Nasionalisasi Perusahaan Listrik dan Gas swasta kepada Parlemen RI selanjutnya dikeluarkan keputusan Presiden RI nomor 163, Oktober 1953 tentang Nasionalisasi Perusahaan Listrik milik bangsa asing di Indonesia jika waktu konsesinya habis. Sejalan dengan meningkatnya perjuangan bangsa Indonesia untuk membebaskan Irian Jaya dari cengkraman penjajahan Belanda maka dikeluarkan Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi perusahaan listrik dan gas milik Belanda . Dengan Undang – Undang tersebut , maka seluruh perusahaan listrik Belanda berada di tangan Indonesia.

Sejarah ketenagaan listrik di Indonesia mengalami pasang surut sejalan dengan pasang surut perjuangan bangsa. Tanggal 27 Oktober 1945 kemudian dikenal sebagai hari LISTRIK DAN GAS , hari tersebut telah diperingati untuk pertama kali pada tanggal 27 Oktober 1945 bertempat di Gedung Badan Pekerja Komite Nasional Pusat (BPKNIP), Yogyakarta . Penetapan secara resmi tanggal 27 Oktober 1945 sebagai hari listrik dan gas berdasarkan keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Tenaga Nomor 20 Tahun 1960 , namun kemudian berdasarkan keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Tenaga Listrik nomor 235/ KPTS/ 1975 peringatan hari listrik dan gas digabung dengan hari kebaktian pekerjaan umum dan tenaga listrik yang jatuh pada tanggal 3 September mengingat pentingnya semangat dan nilai-nilai hari listrik maka berdasarkan keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 1134.K/ 43.PE/1992 tanggal 31 Agustus 1992 ditetapkan tanggal 27 Oktober sebagai HARI LISTRIK NASIONAL.

2.2 Struktur Organisasi.

Struktur Organisasi adalah suatu kerangka yang menunjukkan hubungan-hubungan antara pejabat maupun bidang-bidang kerja satu sama lain, sehingga jelas fungsi dan tanggung jawab masing-masing dalam suatu kebulatan yang teratur. Fungsi struktur organisasi adalah menjelaskan tugas, tanggungjawab dan wewenang yang dimiliki karyawan sehingga setiap fungsi dan kesatuan tanggungjawab dapat diarahkan guna mencapai tujuan perusahaan. Sesuai dengan fungsi Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) tanggal 22 Mei 1996 No. 054.K/023/DIR/1996, struktur organisasi PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Banyuwangi adalah seperti terlihat pada daftar gambar 1.

Diskripsi jabatan (tugas-tugas) yang dilaksanakan oleh pegawai PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Banyuwangi antara lain :

I. Kepala Cabang

Kedudukan : Bertanggung jawab kepada Direksi

Fungsi :

Merumuskan sasaran Cabang, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan pelayanan pelanggan, pendistribusian, dan pembangkit tenaga listrik berikut pembangunannya sesuai kebijakan PLN maupun PLN wilayah atau Distribusi.

Tugas pokok :

- a. Menyusun konsep kebijakan teknik cabang berdasarkan program kerja unit perusahaan induk sebagai bahan usaha
- b. Mengevaluasi kinerja cabang dalam pencapaian target-target yang telah ditetapkan
- c. Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pendistribusian dan membangkitkan tenaga listrik sesuai dengan jadwal dan target perusahaan
- d. Pengarahan dan mengendalikan pelaksanaan perolehan dan pembebasan tanah serta pembangunan sarana pendistribusian dan pembangkitan tenaga listrik.

II. Kepala Bagian Konstruksi dan Distribusi

Fungsi:

Mengkoordinasikan dan mengendalikan perencanaan, pelaksanaan operasi dan pemeliharaan distribusi tenaga listrik serta bangunannya berikut bangunan listrik yang terkait.

Tugas pokok :

- a. Menyusun rencana kerja bagian distribusi dan konstruksi sebagai pedoman kerja
- b. Memberi petunjuk kepada seksi bagian distribusi dan konstruksi untuk kelancaran pelaksanaan tugas
- c. Mengkoordinasikan penyusunan rencana teknis konstruksi, operasi dan pemeliharaan sarana pendistribusian tenaga listrik dan bangunan sipil yang terkait agar sesuai kebutuhan
- d. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan perolehan dan pembebasan tanah untuk pelaksanaan pembangunan konstruksi pendistribusian tenaga listrik agar sesuai dengan rencana
- e. Membuat laporan berkala sesuai dengan bidang tugasnya sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.

Kepala Bagian Konstruksi dan Distribusi membawahi kepala- kepala seksi sebagai berikut :

1. Kepala Seksi Konstruksi Distribusi

Fungsi :

Mengatur dan mengarahkan kegiatan perencanaan , pengendalian dan pengawasan serta administrasi konstruksi pendistribusian tenaga listrik serta bangunan sipil yang terkait guna pencapaian target dan mutu penyelesaian.

Tugas pokok :

- a) Menyusun rencana kerja seksi konstruksi distribusi sebagai pedoman kerja
- b) Memberi petunjuk kepada bawahan seksi konstruksi distribusi untuk kelancaran pelaksanaan tugas

- c) Mengendalikan pelaksanaan administrasi teknik untuk menunjang pelaksanaan pembangunan sarana pendistribusian tenaga listrik
- d) Membuat laporan berkala sesuai dengan bidang tugasnya sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.

2. Kepala Seksi Perencanaan Distribusi

Fungsi :

Mengatur dan mengarahkan bawahannya dalam rangka penyusunan rencana kerja, pemantauan pemutakhiran data atau informasi jaringan distribusi sehingga dapat menunjang target atau sasaran yang telah ditetapkan.

Tugas pokok :

- a) Menyusun rencana kerja seksi perencanaan distribusi sebagai pedoman kerja
- b) Membagi tugas kepada bawahan di seksi dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas
- c) Membuat laporan berkala sesuai dengan bidang tugasnya
- d) Memantau pelaksanaan pemutakhiran data atau informasi jaringan distribusi
- e) Memantau kondisi jaringan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan jaringan distribusi.

3. Kepala Seksi Pemeliharaan Distribusi

Fungsi :

Menyusun rencana kegiatan, membagi tugas bimbingan bawahan, mengevaluasi hasil kerja bawahan dan menyusun program-program distribusi serta membuat laporan seksi pemeliharaan distribusi sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.

Tugas pokok :

- a) Menyusun rencana kerja seksi pemeliharaan distribusi sebagai pedoman kerja
- b) Memberi petunjuk kepada bawahan agar dapat melaksanakan tugas dengan baik
- c) Memeriksa hasil kerja bawahan di seksi pemeliharaan distribusi sebagai bahan evaluasi dan masukan kepada Kepala Cabang

d) Memantau pelaksanaan pemeliharaan distribusi untuk diadakan evaluasi.

4. Kepala Seksi Operasi Distribusi

Fungsi :

Mengatur dan mengarahkan pelaksanaan manuver jaringan, perbaikan gangguan dan pengaturan jaringan yang berkaitan dengan pemasangan gardu, modifikasi dan perluasan jaringan agar keadaan pendistribusian tenaga listrik dapat terjaga dengan baik.

Tugas pokok :

- a) Menyusun langkah kegiatan sesuai rencana kerja seksi operasi distribusi sebagai pedoman kerja
- b) Membuat jadwal kegiatan seksi operasi distribusi dalam rangka pelaksanaan tugas
- c) Mengawasi pelaksanaan pengaturan manuver jaringan dan gardu sesuai dengan SOP (Stading Operation Producer)
- d) Memantau pelaksanaan perbaikan gardu dilokasi pengaduan atau gangguan
- e) Memotivator pelaksanaan pengaturan jaringan sehubungan dengan jadwal pemasangan gardu baru.

5. Kepala Seksi Listrik Pedesaan

Fungsi :

Menyusun rencana dan evaluasi pengembangan dan pengusaha listrik pedesaan sebagai bahan pelaksanaan pembangunan dan pengusaha.

Tugas pokok :

- a) Menyusun rencana kegiatan listrik pedesaan sebagai pedoman kerja
- b) Memberi petunjuk kepada bawahan agar dapat melaksanakan tugas dengan baik
- c) Memantau perkembangan listrik pedesaan dengan target-target desa yang baru dialiri listrik
- d) Menyusun program penyuluhan dan survei listrik pedesaan yang sesuai usulan dan data PEMDA untuk dikoordinasikan dengan bagian terkait.

6. Kepala Seksi Peneraan

Fungsi :

Mengawasi serta memberi petunjuk dan membagi tugas-tugas kepada teknisi peneraan dan urusan administrasi peneraan untuk kelancaran tugas peneraan sehingga sasaran peneraan dapat tercapai.

Tugas pokok :

- a) Menyusun rencana kerja seksi peneraan sesuai rencana kerja sebagai pedoman kerja
- b) Membagi tugas kepada bawahan di seksi peneraan dalam rangka pelaksanaan tugas
- c) Memeriksa hasil kerja bawahan dilingkungan seksi peneraan sebagai bahan pertimbangan
- d) Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan atasan.

III. Kepala Bagian Pelayanan Pelanggan

Fungsi :

Mengkoordinir dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan bagian pelayanan pelanggan yang meliputi pemasaran tata usaha langganan, penyambungan dan pengolahan data guna kelancaran pelaksanaannya.

Tugas pokok :

- a. Menyusun rencana kerja bagian pelayanan pelanggan sebagai pedoman kerja
- b. Memberi petunjuk kepada kepala seksi di bagian pelayanan pelanggan untuk kelancaran pelaksanaan tugas
- c. Membuat laporan berkala sesuai bidang tugasnya
- d. Mengevaluasi data statistik yang berkaitan dengan perkembangan daerah setempat untuk penetapan rencana penjualan
- e. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawab pokoknya.

Kepala Bagian Pelayanan Pelanggan membawahi :

1. Kepala Seksi Pemasaran

Fungsi :

Memberikan pelayanan prima terhadap pelanggan, memberikan informasi kepada calon pelanggan yang pasang baru secara tepat, sehingga dapat memberikan kepuasan kepada calon yang pasang baru secara tepat sehingga dapat memberikan kepuasan kepada calon pelanggan sebanyak-banyaknya (secara selektif).

Tugas pokok :

- a) Menyusun rencana penjualan tenaga listrik dalam rangka pencapaiannya
- b) Mencari pelanggan (secara selektif)
- c) Memperhitungkan rasio daya minimum daya pelanggan (apakah memungkinkan atau tidak memungkinkan)
- d) Membuat laporan daftar pelanggan
- e) Memberikan informasi kepada pelanggan atau calon pelanggan baik secara teknis maupun administrasi.

2. Kepala Seksi administrasi Pelanggan

Fungsi :

Melaksanakan pelayanan pemberian informasi tentang cara, perhitungan besar kecilnya biaya, persyaratan dan informasi lainnya yang berhubungan dengan pemberian penyambungan tenaga listrik yang meliputi perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan pengendalian.

Tugas pokok :

- a) Memberikan informasi tentang hal-hal yang berhubungan dengan penyambungan tenaga listrik kepada calon pelanggan dan masyarakat lainnya
- b) Melayani permintaan penyambungan baru, perubahan daya, penyambungan sementara, perubahan tarif, ganti nama pelanggan serta pengaduan pelanggan
- c) Mencatat, membuat dan mengarsipkan setiap permintaan yang berhubungan dengan pelanggan.
- d) Menyiapkan Permintaan Kerja (PK) pemasangan, perbaikan, perubahan,

pembongkaran sambungan tenaga listrik dan berita acara pelaksanaannya

- e) Mengirim perintah kerja
- f) Memelihara arsip Data Induk Langganan (DII).

3. Kepala Seksi Penagihan

Fungsi :

Melakukan perencanaan, persiapan pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pengurusan penagihan dan pelayanan pembayaran piutang pelanggan.

Tugas pokok:

- a) Merencanakan peningkatan pelayanan penagihan dan penerimaan pembayaran piutang pelanggan
- c) Menerima dan menyiapkan piutang pelanggan dan daftarnya
- c) Mengirim rekening listrik yang diperbaiki dan menerima kembali rekening listrik perbaikan
- d) Memproses piutang pelanggan
- e) Memantau dan mengawasi pelaksanaan penagihan dan pelayanan penerimaan pembayaran piutang pelanggan ditempat-tempat pembayaran secara teratur
- f) Melakukan pemeriksaan fisik rekening yang belum dilunasi.

4. Kepala Seksi Penyambungan

Fungsi :

Mengatur dan mengarahkan kegiatan seksi penyambungan meliputi survei lokasi, pemeriksaan instalasi dan pemasangan SR atau APP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tugas pokok :

- a) Membagi tugas dalam rangka kepada bawahan di seksi penyambungan dalam rangka pelaksanaan tugas
- b) Mengawasi penyambungan SR/APP konsumen besar sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- c) Mengawasi pemeriksaan instalasi calon pelanggan atau pelanggan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

d) Memeriksa surat pemberitahuan keputusan sementara untuk bahan evaluasi.

5. Kepala Seksi Pengolahan Data

Fungsi :

Mengatur dan mengarahkan kegiatan seksi pengolahan data meliputi aplikasi program pengolahan data, penyajian informasi, dan penyimpanan data guna menciptakan sistem informasi yang memadai

Tugas pokok :

- a) Melayani proses pengolahan data dari bagian-bagian lain, dengan aplikasi program yang sudah ada
- b) Mengevaluasi sistem informasi yang ada untuk modifikasi sesuai kebutuhan
- c) Memeriksa hasil pengolahan data untuk bahan evaluasi pengembangannya.
- d) Melaksanakan koordinasi dengan seksi terkait guna kelancaran pengolahan data.

6. Kepala Seksi Perencanaan Meter

Kepala seksi perencanaan meter ini belum dilaksanakan

IV. Kepala Bagian administrasi

Fungsi :

Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bagian administrasi yang meliputi kepegawaian, anggaran dan keuangan, akuntansi, perbekalan dan sekretariat untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan.

Tugas pokok :

- a. Menyusun rencana kerja kegiatan administrasi sebagai pedoman kerja
- b. Memberi petunjuk kepada kepala seksi dibagian administrasi untuk kelancaran pelaksanaan tugas
- c. Membuat laporan berkala sesuai dengan bidang tugasnya
- d. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang sesuai dengan kewajiban tanggung jawab pokoknya
- e. Mengawasi kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kepegawaian, anggaran dan keuangan, akuntansi, perbekalan dan sekretariat untuk

mengetahui hambatan-hambatan dan usaha penyelesaiannya.

Kepala Bagian Administrasi membawahi

1. Kepala Seksi Kepegawaian

Fungsi :

Mengatur dan mengarahkan kegiatan kepegawaian yang meliputi pengembangan sumber daya manusia, tata usaha kepegawaian, kesejahteraan pegawai, keselamatan dan kesejahteraan pegawai, keselamatan dan kesehatan kerja (K3) guna kelancaran tugasnya.

Tugas pokok :

- a) Menyusun rencana kerja seksi kepegawaian sesuai rencana kerja bagian sebagai pedoman kerja
- b) Mengajukan usulan kebutuhan tenaga kerja PT. PLN (Persero) Cabang berdasarkan perhitungan beban kerja dan formasi jabatan
- c) Mengajukan usulan pendidikan dan latihan kerja yang diperlukan oleh pegawai sesuai dengan bidangnya
- d) Mengatur pelaksanaan tata usaha pengagajian dan pengupahan pegawai serta kesejahteraan pegawai sesuai dengan peraturan yang berlaku
- e) Memeriksa konsep surat keputusan mutasi pegawai dilingkungan Cabang berdasarkan kebutuhan pegawai.

2. Kepala Seksi Anggaran dan Keuangan

Fungsi :

Mengatur dan mengarahkan kegiatan dibidang anggaran dan keuangan yang meliputi penyusunan rencana anggaran, pemantauan anggaran pendapatan dan belanja cabang, pengolahan dana, pengasuransian, dan kegiatan perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tugas pokok :

- a) Menyusun rencana kerja seksi anggaran dan keuangan sesuai rencana kerja bagian, sebagai pedoman kerja

- b) Mengklasifikasikan data-data biaya dan pendapatan untuk memudahkan penyusunan anggaran
- c) Mengawasi penerimaan uang dengan cara membandingkan fisik uang dengan catatan penerimaan
- d) Memonitor penerimaan anggaran tunai untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

3. Kepala Seksi Akuntansi

Fungsi :

Mengatur dan mengarahkan dibidang akuntansi meliputi pencatatan transaksi, aktiva tetap PDP, persediaan barang serta pembuatan laporan pembukuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tugas pokok :

- a) Menyusun rencana kerja seksi akuntansi sesuai rencana kerja sebagai pedoman kerja
- b) Mengklasifikasikan data-data transaksi untuk pembuatan kode perkiraan sesuai dengan fungsinya
- c) Memeriksa buku jurnal dan buku besar guna kecocokan pencatatannya
- d) Memonivator pembuatan laporan-laporan dibidang akuntansi untuk ketepatan jadwal pembuatannya
- e) Memeriksa laporan-laporan dibidang akuntansi baik rutin maupun berkala untuk kebenaran pembuatannya.

4. Kepala Seksi Perbekalan

Fungsi :

Mengatur dan mengarahkan kegiatan dibidang perbekalan, yang meliputi rencana persediaan dan pengadaan barang, peralatan, perbekalan berdasarkan kebutuhan.

Tugas pokok :

- a) Membuat rencana kerja persediaan barang dan peralatan perbekalan berdasarkan kebutuhan dan realisasi pemakaian sebelumnya
- b) Memeriksa administrasi perbekalan sesuai dengan keluar masuknya barang

- c) Menentukan jumlah minimal barang yang harus tersedia di gudang berdasarkan pemakaian barang sebelumnya
- d) Mempelajari, mengikuti fluktuasi harga-harga satuan baik berdasarkan ketentuan PT. PLN (Persero) maupun harga dipasaran untuk bahan pedoman pengadaan.

5. Kepala Seksi Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK)

Fungsi :

Memeriksa kelayakan usaha kecil dan koperasi yang akan diberi , mengawasi dan membina pelaksanaan bantuan tersebut, serta membuat daftar usaha kecil dan koperasi yang berlaka.

Tugas pokok :

- a) Menyusun rencana kerja seksi PUKK sebagai pedoman kerja
- b) Merencanakan serta membina usaha kecil dan koperasi yang akan menjadi mitra binaan
- c) Mengarahkan dan memberi petunjuk anggota dan calon anggota usaha kecil dan koperasi dalam mengelola usahanya
- d) Mengklasifikasikan dan menetapkan usaha kecil dan koperasi yang banyak di beri bantuan.

6. Kepala Seksi Kesekretariatan dan Umum

Fungsi :

Mengatur dan mengarahkan kegiatan kesekretariatan meliputi surat menyurat, kebutuhan fasilitas atau sarana kerja dan pemeliharaan sarana kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tugas pokok :

- a) Menyusun rencana kerja seksi kesekretariatan sesuai dengan rencana kerja bagian, sebagai pedoman kerja
- b) Mengatur penerimaan dan pendistribusian surat-surat sesuai dengan jenis surat dan proses selanjutnya
- c) Memeriksa kegiatan inventarisasi sarana kerja untuk kebenaran penyajian

V. Kepala Ranting

Fungsi :

Merumuskan sasaran kerja ranting serta mengkoordinasikan dan mengendalikan bawahan dalam rangka membangkitkan, mengoperasikan dan memelihara serta mendistribusikan tenaga listrik kepada konsumen dan pengurangan susut Kwh terjual dan jumlah sambungan terpasang.

Tugas pokok :

- a) Mengatur dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka membina dan memotivasi bawahan serta kelancaran pelaksanaan tugas
- b) Memeriksa dan menandatangani bukti-bukti pengesahan penerimaan dan pengeluaran uang, surat perintah kerja dan surat dinas resmi yang dilaksanakan oleh ranting
- c) Mengevaluasi pelaksanaan tugas di seksi-seksi untuk mengetahui apakah sesuai dengan sasaran yang ditetapkan
- d) Membuat dan menyampaikan laporan kegiatan ranting, sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas kepala cabang.

Kepala Ranting membawahi :

1. Kepala Seksi Distribusi

Fungsi :

Mengawasi dan mengarahkan langkah kegiatan perencanaan pengoperasian dan pemeliharaan jaringan distribusi serta perbaikan gangguan jaringan agar keadaan sistem pendistribusian tenaga listrik tetap terjaga.

Tugas pokok :

- a) Membuat jadwal kegiatan seksi distribusi dalam rangka pelaksanaan tugas
- b) Mengawasi pelaksanaan pengoperasian jaringan distribusi
- c) Memantau pelaksanaan pemeliharaan distribusi untuk keandalan system
- d) Mengevaluasi data perbaikan jaringan untuk keandalan system
- e) Mengawasi pelaksanaan program pemeriksaan penerbitan aliran listrik sesuai

target sasaran pemeliharaan.

2. Kepala Seksi Pelayanan Pelanggan

Fungsi :

Mengawasi dan mengarahkan langkah kegiatan perencanaan, pengoperasian dan pemelihara jaringan distribusi serta perbaikan gangguan jaringan agar keandalan sistem pendistribusian tenaga listrik tetap terjaga.

Tugas pokok :

- a) Meneliti dan memeriksa berkas permohonan penyambungan baru atau penambahan daya dari calon pelanggan atau pelanggan berdasarkan data teknis dari seksi terkait
- b) Mengawasi kemungkinan terjadinya pencurian tenaga listrik secara terpadu sebagai upaya mengurangi susut nonteknis
- c) Mempercepat proses pelaksanaan pelayanan terhadap pelanggan atau calon pelanggan sesuai kewenangannya
- d) Memonitor kegiatan tata usaha langganan yang meliputi Kwh terjual, tagihan rekening, piutang listrik sesuai dengan target yang telah ditentukan PLN cabang.

3. Kepala Kantor Jaga

Fungsi :

Melaksanakan pemasaran, operasi dan pemeliharaan, pendistribusian tenaga listrik serta tata usaha langganan.

Tugas pokok :

- a) Menyusun rencana kegiatan kantor jaga sebagai pedoman kerja didalam pelaksanaan tugas
- b) Memantau pekerjaan pencatatan meter sesuai dengan kewenangan dan target yang telah ditentukan
- b) Mengawasi pelaksanaan pembayaran rekening listrik pengesahan
- d) Mengajukan usulan penambahan perluasan jaringan tegangan rendah
- e) Mengawasi gangguan listrik.

2.3 Personalia

1. Jumlah Karyawan

PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Banyuwangi mempunyai beberapa karyawan. adalah sebagai berikut:

Bagian Konstruksi Distribusi	: 34 orang
Bagian Pelayanan Pelanggan	: 29 orang
Bagian Administrasi	: <u>33 orang</u> +
Jumlah	: 98 orang

2. Sistem Penggajian

Setiap karyawan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Banyuwangi selain mendapat gaji pokok juga mendapat tunjangan kompensasi karyawan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan.

Adapun sistem pembayaran gaji yang dilaksanakan oleh PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Banyuwangi adalah:

Tanggal 1	: Seluruh karyawan mendapat gaji pokok dan tunjangan pangan, sedangkan untuk kepala kantor selain mendapat gaji pokok dan tunjangan pangan juga mendapat tunjangan khusus.
Tanggal 16	: Seluruh karyawan dan keluarganya mendapat tunjangan kompensasi karyawan dan tambahan gaji bagi karyawan yang lembur.

2.4 Gambaran Tugas Sumber Data Utama

Dalam pelaksanaan Praktek kerja nyata ini sumber data utama penulis peroleh dari beberapa seksi-seksi diantaranya:

1. Kepala Seksi Perencanaan Distribusi

Fungsinya:

Mengatur dan mengarahkan bawahannya dalam rangka penyusunan rencana kerja, pemantauan pemutakhiran data atau informasi jaringan distribusi.

1. Kepala Seksi Perencanaan Distribusi

Fungsinya:

Mengatur dan mengarahkan bawahannya dalam rangka penyusunan rencana kerja, pemantauan pemutakhiran data atau informasi jaringan distribusi.

Tugas pokoknya:

Menyusun rencana kerja seksi perencanaan distribusi, membagi tugas kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas, membuat laporan berkala untuk perencanaan, memantau pelaksanaan pemutakhiran data dan atau informasi, mamantau kondisi jaringan berkaitan dengan pemeliharaan jaringan distribusi.

2. Kepala Seksi Pemasaran

Fungsi :

Memberikan pelayanan terhadap pelanggan, memberi informasi pada pelanggan yang pasang baru secara tepat.

Tugas pokok:

Menyusun rencana penjualan tenaga listrik, mencari pelanggan secara selektif, menghitung rasio daya minimum pelanggan, membuat laporan daftar pelanggan, memberi informasi kepada pelanggan secara teknis maupun administrasi.

3. Kepala Seksi Anggaran dan Keuangan

Fungsi:

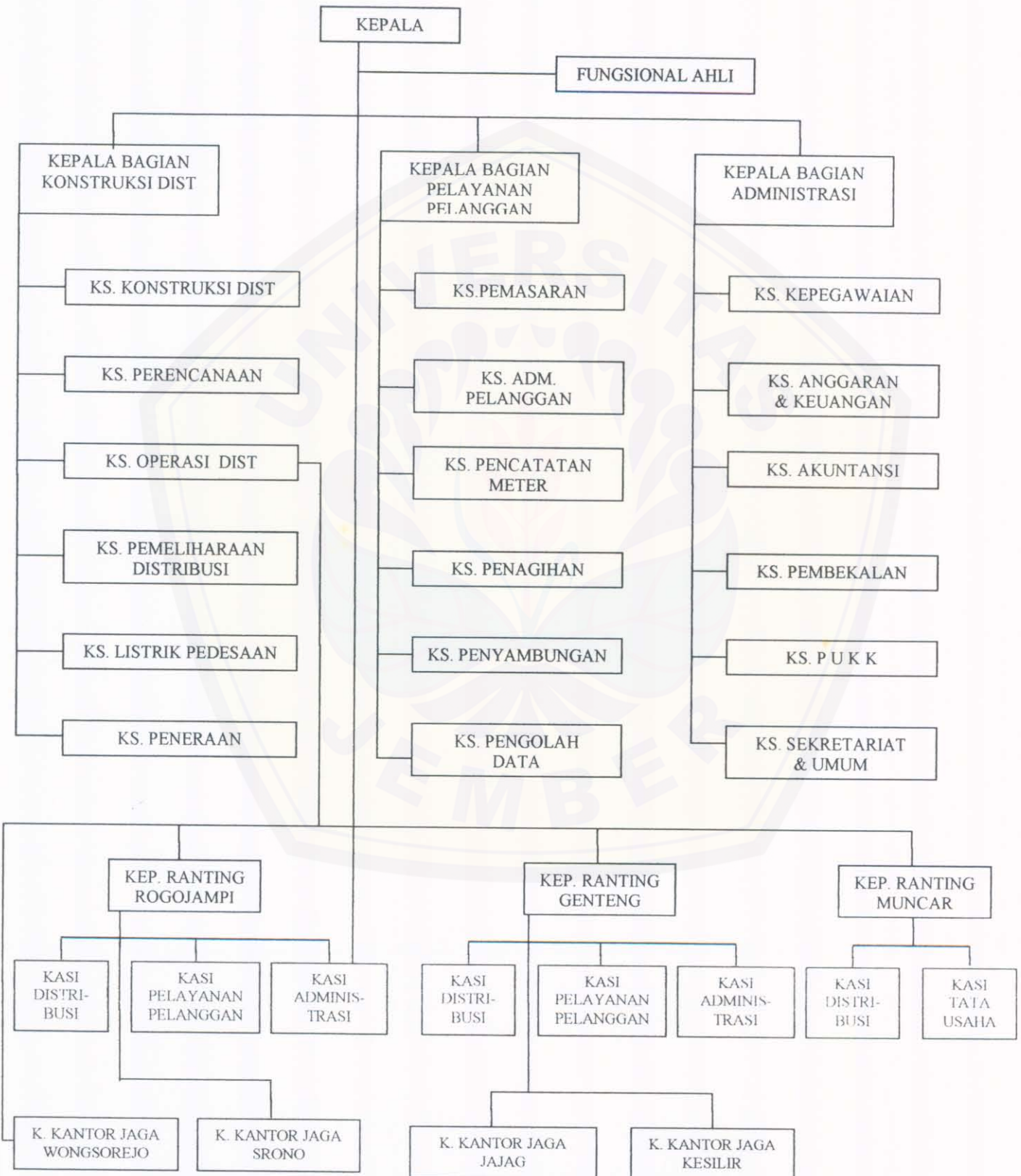
Mengatur dan mengarahkan kegiatan di bidang anggaran dan keuangan yang meliputi penyusunan rencana anggaran, pemantauan APB cabang, pengolahan dana, dan kegiatan perpajakan sesuai dengan ketentuan.

Tugas pokok:

Menyusun rencana kerja anggaran dan keuangan, mengklasifikasikan data biaya dan pendapatan, mengawasi penerimaan uang dan catatan penerimaan, dan memonitor penerimaan anggaran tunai, serta melakukan kegiatan perpajakan perusahaan.

Gambar 1 :

STRUKTUR ORGANISASI PT. PLN (PERSERO) DISTRIBUSI JAWA TIMUR CABANG BANYUWANGI



Sumber : PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Banyuwangi.

III. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA

3.1 Diskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

3.1.1 Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Praktek kerja nyata ini dimulai setelah dipenuhinya persyaratan praktek kerja nyata yaitu, telah menyelesaikan 100 sks. Sebelum praktek kerja nyata dimulai, penulis terlebih dahulu mendapatkan pengarahan tentang pelaksanaan praktek kerja nyata dikampus, yang kemudian pada tanggal 19 Februari 2001 praktek kerja nyata dilaksanakan, tepatnya di PT. PLN (Persero) Cabang Banyuwangi. Disini kami langsung diterima baik oleh Kepala Cabang PT. PLN (Persero) yang diwakili oleh Ka. seksi kepegawaian selaku penanggung jawab pelaksanaan praktek kerja nyata sekaligus juga menjadi pembimbing praktek kerja nyata setempat. Untuk awal pelaksanaan praktek kerja nyata, kami dibimbing dan diberikan penjelasan umum mengenai PT. PLN baik dari segi fungsi, tugas dan usahanya yang bergerak dibidang *care busines*, yang dilanjutkan dengan penjelasan dari Ka. bagian pelayanan pelanggan mengenai 6 fungsi PT. PLN, seterusnya pengenalan bagian – bagian atau seksi – seksi yang ada di PT. PLN, yang mana kami diberikan kebebasan untuk mencari data- data yang dibutuhkan pada semua seksi yang ada kaitannya dengan bahan laporan. Dilanjutkan dengan pengenalan kepada karyawan PT. PLN Cabang Banyuwangi.

Pada hari kedua yaitu tanggal 20 Februari 2001, mempelajari tentang tugas pokok dari seksi - seksi yang ada di PT. PLN serta membantu memasukkan data-data pelanggan. Hari Rabu, 21 Februari - 27 Februari 2001, penulis mempelajari kegiatan yang ada di seksi pelayanan pelanggan mulai dari menghitung Tarif Dasar Listrik, perhitungan pembayaran rekening, menghitung pembayaran untuk tambah daya, gangguan penggunaan listrik (opal), mempelajari kegiatan penagihan rekening, serta bagaimana cara dan syarat untuk pasang baru tenaga listrik, karena di seksi inilah awal dari semua kegiatan PT. PLN, sebagai dasar pengenalan kegiatan PT. PLN.

Minggu ke dua pada pelaksanaan praktek kerja nyata ini, mulai tanggal 28 Februari- 5 Maret penulis mempelajari kegiatan yang ada di seksi perencanaan distribusi, pemilihan seksi ini sesuai dengan apa yang akan penulis buat sebagai bahan dari laporan. Dimana dalam rangka pengumpulan data, penulis menggunakan metode interview dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan obyek yang diteliti (subyek pajak) beserta penyelesaiannya. Definisi Interview menurut Koentjoroningrat (1983) yaitu “Metode wawancara yang menyangkut cara yang digunakan seseorang untuk tujuan suatu tugas tertentu, metode untuk mendapatkan keterangan atau pendirian secara ilmiah dari seorang responden dengan cara berhadapan muka dengan orang lain itu”, selain metode Interview, metode lain yang penulis gunakan adalah metode pengamatan yaitu dengan melakukan pengamatan atau terjun langsung ke seksi perencanaan distribusi untuk mengetahui bagaimana proses penunjukan rekanan serta pekerjaan pengadaan material. Di seksi ini kegiatan yang dilaksanakan dan di pelajari oleh penulis antara lain ; pengadaan material PLN, pemborongan pemasangan tenaga listrik baru, pendataan rekanan dari PT. PLN, surat kuasa kerja untuk investasi, serta bagaimana tata cara pemborongan dan pengadaan material PT. PLN.

Pada minggu ketiga dari pelaksanaan praktek kerja nyata, penulis mulai mempelajari kegiatan - kegiatan yang ada di seksi anggaran dan keuangan selaku seksi yang menangani bidang perpajakan. Di seksi inilah yang memegang peranan penting dalam hal perpajakan, mulai dari pembayaran kepada rekanan, pemungutan PPN, pelaporan serta pembayaran PPN tersebut melalui Kantor Pelayanan Pajak setempat. Adapun kegiatan yang dapat dipelajari dan dikerjakan oleh penulis antara lain ; Memasukkan segala pemasukan dan pengeluaran yang ada di PT. PLN dengan menggunakan sistem kas impres, menghitung jumlah tagihan rekening yang masuk, mencari data tentang pembayaran atas pengadaan material dan pemborongan, mempelajari bagaimana pemotongan pajak yang dilakukan oleh PT. PLN,

mempelajari bagaimana sistem pembayaran dan pelaporan pajak yang dipungut/dipotong oleh PT. PLN. Di seksi ini mulai tanggal 7 Maret -14 Maret 2001.

Minggu terakhir dari pelaksanaan praktek kerja nyata, yaitu tanggal 15 Maret-18 Maret 2001 penulis gunakan untuk menyempurnakan data dari bagian gudang selaku penerima dan penjual material PT. PLN, kegiatan yang dilakukan dibagian ini adalah ; mencari data tentang formulir berita acara pemeriksaan barang yaitu TUG. 4 serta formulir kode 02 untuk penerimaan material di gudang, mempelajari bagaimana surat pengantar barang dikeluarkan, sampai dengan pelaporan penggunaan dan pengadaan material pada seksi perencanaan distribusi. Pada tanggal 19 Maret - 20 Maret 2001 kami gunakan untuk menyusun dan melengkapi data - data yang akan kami pakai sebagai bahan laporan baik dari seksi pemasaran, perencanaan distribusi, serta anggaran dan keuangan. Sedangkan untuk hari terakhir pelaksanaan praktek kerja nyata, tepatnya tanggal 20 Maret 2001 digunakan untuk memohon diri kepada seluruh staf yang diwakili oleh Ka. seksi kepegawaian sebagai penghormatan untuk mengakhiri pelaksanaan praktek kerja nyata.

3.1.2 Jangka waktu, Obyek, dan Tempat Praktek Kerja Nyata

3.1.2.1 Jangka waktu praktek kerja nyata

Praktek kerja nyata dilakukan selama satu bulan mulai hari Senin, 19 Februari sampai dengan Selasa, 20 Maret 2001 dengan jadwal kerja efektif 5 hari kerja

Senin - Kamis : 07.30 - 12.00

Jum'at : 06.00 - 11.00

3.1.2.2. Obyek Praktek Kerja Nyata

Obyek dari Praktek kerja nyata adalah PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Banyuwangi, yang terletak di wilayah Kabupaten Banyuwangi. PT. PLN (Persero) didirikan diatas tanah dengan luas area 5274 m² dan bangunan 247 m², yang mempunyai 29 ruangan, 2 tempat parkir, 2 gudang, 1 musholla, dan 1 rumah penjaga.

3.1.2.3. Tempat Praktek Kerja Nyata

Praktek kerja nyata dilakukan di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Banyuwangi, yang terletak di Jalan Nusantara No.1 Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi.

3.1.3 Hasil Praktek Kerja Nyata

Salah satu kegiatan yang penulis amati pada waktu pelaksanaan praktek kerja nyata di PT. PLN Cabang Banyuwangi adalah kegiatan perpajakan yang dilakukan, khususnya pengenaan PPN atas jasa rekanan bidang pengadaan material.

Seperti kita ketahui, salah satu dana yang digunakan dalam pembangunan bersumber dari pajak. Sehubungan dengan hal tersebut PT. PLN selaku wajib pajak juga berperan dalam pembiayaan pembangunan lewat pajak yang dibayarkannya, diantaranya PPh, PPN / PPn BM, PBB dan lainnya.

Definisi pajak menurut :

1. Prof. Dr Rachmat Soemitro, SH adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
2. Dr. N. J Feldmann pajak adalah utang prestasi kepada pemerintah yang dapat dipaksakan berdasarkan norma – norma umum, tanpa adanya kontraprestasi, dan yang digunakan untuk menutupi pengeluaran pemerintah.
3. Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak yang dikenakan atas konsumsi dalam negeri (didalam daerah pabean), baik konsumsi barang ataupun konsumsi jasa, pengertian ini menurut Undang-Undang nomor 18 tentang PPN Tahun 2000.

Berdasar pengertian diatas, maka penulis akan melaporkan bagaimana munculnya PPN atas jasa rekanan bidang pengadaan material tersebut. Pengenaan PPN atas jasa rekanan bidang pengadaan material di PT. PLN (Persero) Cabang Banyuwangi berasal dari adanya permintaan penyambungan/ pemasangan baru tenaga listrik. Dimana dalam upaya memberikan pelayanan yang maksimal kepada calon

pelanggan, PT. PLN menyediakan sistem paket dan sistem non paket pada pemasangan/ penyambungan baru. Sistem paket adalah suatu pelayanan pemasangan/penyambungan baru tenaga listrik termasuk pelayanan pemasangan instalasi yang IML (instalasi milik langganan) ditentukan oleh PT. PLN. Sedangkan yang dimaksud dengan Sistem non paket adalah kebalikannya, dimana yang menentukan adalah instalatir.

Adapun prosedur yang harus dipenuhi oleh calon pelanggan untuk menjadi pelanggan adalah sebagai berikut :

- a. Calon pelanggan harus datang keloket pelayanan pelanggan untuk mengisi formulir penyambungan baru (TUL I-01) yang disediakan di loket fungsi pelayanan pelanggan, dalam rangkap tiga ;

- 1) Lembar asli untuk fungsi pelayanan pelanggan
- 2) Tembusan ke-1 untuk calon pelanggan sebagai tanda terima
- 3) Tembusan ke-2 untuk fungsi survei data teknik.

Yang juga harus disertai dokumen pendukung yaitu ;

- 1) Foto copy Kartu Tanda Penduduk
- 2) Surat kuasa dari calon pelanggan yang memberi kuasa
- 3) Sket lokasi yang akan diajukan pasang baru

Selain datang keloket pelayanan, calon pelanggan juga bisa mendaftar lewat surat/faximile/telex, telephone, ataupun lewat pemasaran keliling yang dilakukan oleh PT. PLN, dengan syarat dan ketentuan yang sama dengan mendaftar di loket pelayanan pelanggan.

- b. Dari permintaan penyambungan baru tersebut, PT. PLN akan memberikan jawaban dalam bentuk SJPS (Surat Jawaban Pasang Baru diSetujui) dan SJPT (Surat Jawaban Pasang Baru Tidak diSetujui/diTangguhkan). Tetapi sebelum SJPS/SJPT dikeluarkan PT. PLN melakukan survei lapangan, jika keadaan sesuai (mudah dilakukan pemasangan) maka SJPS akan dikeluarkan dan sebaliknya jika keadaan sulit dilakukan penyambungan maka akan

dikeluarkan SJPT. Surat jawaban ini dikeluarkan dalam batas waktu maksimal 10 hari, hal ini untuk meningkatkan efektifitas pelayanan PT. PLN kepada pelanggan

- c. Apabila surat jawaban berupa SJPS (TUL I-03) maka PT. PLN akan membuat surat perjanjian jual beli tenaga listrik antara calon pelanggan dengan PT. PLN, surat ini dikeluarkan bersamaan dengan SJPS.
- d. Syarat lain yang juga harus di penuhi oleh calon pelanggan sebelum pelaksanaan penyambungan adalah melunasi biaya penyambungan dan uang jaminan langganan sesuai dengan tarif dasar listrik yang berlaku, sebagai berikut :

Tabel 1. Tarif dasar listrik

Biaya penyambungan tenaga listrik

No	U R A I A N	Rp./ VA
1.	Sambungan satu fase atau tiga fase dengan pembatasan daya dan pengukuran TR :	
	1.1 Daya tersambung dari 250 VA s/d 2.200 VA	Rp. 150
	1.2 Daya tersambung dari 2.201 VA s/d 200 k VA	RP. 200
	Termasuk untuk sambungan Rumah tangga golongan tarif R –3 dengan daya diatas 200 kVA	
2.	Sambungan tiga fase dengan pembatasan daya dan pengukuran TM dengan daya tersambung 201 kVA keatas.	Rp. 125
3.	Sambungan tiga fase dengan pembatasan daya dan pengukuran TT dengan daya tersambung 30.000 kVA keatas.	Rp. 100
4.	Sambungan satu fase dengan pembatasa daya dan pengukuran TR dibangun pelanggan :	
	4.1 Khusus tarif S – 1 s/d 200 VA	Rp. 30.000/ sambungan
	4.2 Untuk penambahan daya dari golongan tarif S – 1 (tanpa meter) menjadi 450 VA atau 500 VA	Rp. 20.000/ sambungan

Sumber : Seksi pemasaran PT. PLN (Persero) Cabang Banyuwangi.

Tabel 2. Tarif dasar listrik

Uang jaminan pelanggan pola – B

No	GOLONGAN TARIF			Rp./ VA
	Kode Tarif	TARIF		
1.	S - 1	Pemakai sangat kecil	TR	55,00
2.	S - 2	Badan sosial kecil s/d sedang	TR	66,00
3.	S - 3	Badan sosial besar	TM	90,00
4.	R - 1	Rumah tangga kecil s/d sedang	TR	90,00
5.	R - 2	Rumah tangga menengah	TR	162,00
6.	R - 3	Rumah tangga besar	TR	165,00
7.	B - 1	Bisnis kecil	TR	127,00
8.	B - 2	Bisnis sedang	TR	162,00
9.	B - 3	Bisnis besar	TM	150,00
10.	I - 1	Industri kecil / Rumah tangga	TR	90,00
11.	I - 2	Industri sedang	TR	120,00
12.	I - 3	Industri menengah	TM	130,00
13.	I - 4	Industri besar	TT	133,00
14.	P - 1	Gedung kantor pemerintah kecil s/d sedang	TR	140,00
15.	P - 2	Gedung kantor pemerintah besar	TM	100,00
16.	P - 3	Penerangan jalan umum	TR	225,00

Keterangan :

TR : Tegangan Rendah

TM : Tegangan Menengah

TT : Tegangan Tinggi

Dasar, Keputusan Direksi No. 63.K/010/DIR/2000

Tanggal 25 April 2000

Setelah semua syarat dipenuhi maka dilakukanlah penyambungan baru. Atas penyambungan/pemasangan baru secara kolektif ataupun untuk perluasan jaringan tenaga listrik, PT. PLN Cabang Banyuwangi akan menunjuk rekanan dalam pelaksanaannya, yang mana untuk rekanan PT. PLN Cabang Banyuwangi terdiri dari instalatir-instalatir dari beberapa CV. yang tergabung dalam AKLI (Asosiasi Kontraktor Listrik Indonesia) Cabang Banyuwangi, dimana rekanan di PT. PLN Cabang Banyuwangi ini dibagi atas dua bidang, yaitu bidang pengadaan material dan bidang pemborongan. Dalam hal ini penulis akan mengkhususkan membahas rekanan dalam bidang pengadaan material. CV. selaku rekanan untuk pengadaan material itu diklasifikasikan menjadi empat golongan, diantaranya :

1. CV. kelas A, yang menangani SLTR (Saluran Listrik Tegangan Rendah)
2. CV. kelas B, yang menangani JTR (Jaringan Tegangan Rendah)
3. CV. kelas C, yang menangani TM (Tegangan Menengah)
4. CV. kelas D, yang menangani tower dan konstruksi

PT. PLN akan menentukan CV. kelas mana yang sesuai dengan pekerjaan yang akan diserahkan untuk dilaksanakan, sampai saat ini jumlah rekanan di PT. PLN mencapai 12 rekanan sebagai berikut :

Tabel 3. Jumlah Rekanan dan Klasifikasi bulan Oktober 2000 – Februari 2001

No.	N a m a R e k a n a n	Jenis pekerjaan	Klasifikasi Gol.
1.	CV Badung Sakti	Pengad. material	SLTR
2.	CV Surya Agung	Pengad. material	SLTR
3.	CV Oerip Santoso	Pengad. material	SLTR
4.	CV Persada Teknik	Pengad. material	SLTR
5.	CV Cahaya Karya	Pengad. material	TM
6.	CV Gondo Mulyo	Pengad. material	SLTR
7.	KPN Koperlin	Pengad. material	JTR
8.	CV Wangi Murni	Pengad. material	SLTR
9.	CV Sabila Mandiri	Pengad. material	SLTR
10.	CV Surya Teknik	Pengad. material	JTR
11.	CV Bahagia	Pengad. material	SLTR
12.	CV Bama	Pengad. material	SLTR

Sumber : Seksi perencanaan distribusi PT. PLN (Persero) Cabang Banyuwangi.

Adapun cara pemilihan rekanan oleh PT. PLN Cabang Banyuwangi terbagi atas dua cara, yaitu ;

1. Sistem penunjukan langsung
2. Sistem tender

Sistem Penunjukan Langsung

Pada sistem ini syarat – syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi rekanan sebagai berikut :

a) Syarat – syarat umum

1. Yang diperkenankan mengikuti penunjukan langsung adalah ;
 - a. Rekanan yang mempunyai Tanda Daftar Rekanan (TDR) untuk tahun anggaran yang bersangkutan, dari Pemda Tingkat I Propinsi Jawa Timur sesuai dengan ketentuan yang berlaku, klasifikasi : pengadaan material
 - b. Rekanan yang telah mengambil dokumen penunjukan langsung
 - c. Rekanan yang telah mengikuti rapat penjelasan penunjukan langsung/ penunjukan kantor.
2. Ketentuan yang harus dipenuhi rekanan
 - a. Ketentuan dalam Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) No. 038 K/920/01R/08, tentang pengadaan barang dan jasa PT. PLN (Persero) serta Perundang – Undangan yang berlaku, Sebagai berikut ;
 - Tentang pengadaan Barang dan Jasa PT. PLN, maka dalam pekerjaan pengadaan ini rekanan wajib menggunakan barang-barang hasil dalam negeri yang memenuhi syarat teknis
 - Tentang pengadaan barang dan jasa PT. PLN, pelelangan ini dilakukan dengan selalu memperhatikan diperolehnya harga barang yang paling menguntungkan negara dan dapat dipertanggungjawabkan, dan diperolehnya barang dan jasa

dengan kualitas menurut persyaratan teknis yang telah ditentukan.

- b. Mematuhi dan menta'ati peraturan penunjukan langsung yang ditetapkan oleh PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Banyuwangi
- c. Tunduk dan ta'at serta bersedia mengikuti ketentuan/syarat-syarat Rencana Kerja dan Syarat
- d. Tunduk dan ta'at serta mematuhi Keputusan Direksi
- e. Tunduk dan ta'at serta sanggup mematuhi peraturan – peraturan, ketentuan – ketentuan, syarat penawaran harga yang telah ditetapkan pemberi tugas
- f. Membuat perjanjian/kontrak sesuai dengan harga penawaran yang telah diajukan dan disetujui pemberi tugas

Bagi rekanan yang telah memenuhi persyaratan penunjukan langsung maka PT. PLN akan menunjuk rekanan, disini PT. PLN mengajukan permintaan penawaran sesuai dengan RAB (Rancangan Anggaran Biaya), jika balasan penawaran dari rekanan sesuai dengan standart maka dapat disetujui dan dikeluarkan SPK (Surat Perintah Kerja) untuk pengadaan material.

Setelah SPK /Surat Penunjukan terbit (dengan dilampiri RAB yang disetujui), maka ada beberapa syarat administrasi yang harus dipenuhi.

- b) Syarat – syarat Administrasi :
 1. Pelaksanaan penandatanganan kontrak/suatu perjanjian selambat-lambatnya 3 hari setelah surat penunjukan
 2. Mulai melaksanakan pekerjaan, yang mana rekanan harus bekerja dengan mengikuti ketentuan/syarat-syarat dalam Rencana Kerja dan Syarat serta tunduk kepada petunjuk-petunjuk direksi baik lisan ataupun tertulis

Jika ke dua syarat baik syarat umum maupun syarat khusus dipenuhi maka dimulailah pekerjaan pengadaan material.

Sistem Tender

Dalam sistem ini, syarat-syarat untuk menjadi rekanan sama dengan syarat umum pada sistem penunjukan langsung, akan tetapi dalam sistem tender ini PT. PLN akan mengumpulkan beberapa rekanan (bukan hanya satu seperti pada sistem penunjukan langsung) untuk melakukan permintaan penawaran.

Pelaksanaan penawaran dilakukan dengan surat penawaran, adapun bentuk surat penawaran sebagai berikut ;

1. Dibuat rangkap dua, 1 lembar asli dan 1 lembar tindasan, bermaterai 2000, bertanggal dan ditandatangani penanggungjawab perusahaan
2. Harga penawaran dalam surat penawaran harus dicantumkan dengan jelas angka dan hurufnya.
3. Dalam harga penawaran sudah dimasukkan unsur PPN sebesar 10%

Syarat penawaran harus dilampiri dengan ;

1. Neraca perusahaan terakhir, daftar susunan pemilikan modal, susunan pengurus, Akte pendirian perusahaan dan perubahannya
2. Rekaman NPWP yang masih berlaku
3. Referensi bank terbaru untuk tahun anggaran 2000 ditunjukkan pada PT. PLN (Persero) Cabang Banyuwangi
4. Rekapitulasi dan rincian harga penawaran
5. Salinan/foto copy TDR, TDR asli dibawa saat pembukaan penawaran
6. Struktur organisasi
7. Jangka waktu perkiraan penyerahan barang
8. Asal usul barang
9. Surat keterangan sebagai pabrikan atau agen tunggal

Untuk kemudian disampaikan, dengan tata cara penyampaian dibagi atas :

- a. Disampaikan sendiri oleh rekanan dengan memasukkan surat penawaran tersebut ke kotak penawaran yang disediakan di kantor PT. PLN (Persero) Cabang Banyuwangi
- b. Disampaikan melalui pos, dengan menggunakan 2 sampul.

Dalam hal penyampaian langsung, kriteria sampul sebagai berikut ;

- A. Seluruh dokumen penawaran dimasukkan kedalam satu sampul yang dibuat dari bahan tidak tembus baca/lihat
- B. Dibagian muka sebelah kiri atas sampul ditulis
RKS No : 001/RKS/BWG/01/2000
Pekerjaan : Pengadaan Material
Hari : Sesuai schedule
Tanggal : Sesuai schedule
Jam : Sesuai schedule

Sedangkan untuk dokumen yang disampaikan lewat pos, digunakan dua sampul yaitu

- A. Sampul luar hanya memuat “Kepada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Banyuwangi”.
- B. Sampul dalam memuat
Alamat (seperti pada sampul luar) dari sebelah kiri atas ditulis ;
RKS No. : 001/RKS/BWG/01/2000
Pekerjaan : Pengadaan Material
Hari : Sesuai schedule
Tanggal : Sesuai schedule
Jam : Sesuai schedule

Apabila tata cara diatas tidak dipenuhi maka dokumen penawaran dinyatakan tidak sah, tetapi jika dokumen penawaran kurang lengkap dapat dilengkapi sebelum penyerahan dokumen penawaran ditutup. Dan jika, tata cara dipenuhi semua barulah diadakan pembukaan dokumen penawaran yang dilakukan didepan rekanan atau wakilnya segera setelah penawaran ditutup, dari penawaran yang telah disetujui baik

oleh rekanan ataupun PT. PLN, dengan pertimbangan Rancangan Anggaran Biaya dari PT. PLN (persero) Cabang Banyuwangi. Adapun data Rancangan Anggaran Biaya PT. PLN terlampir, sedangkan untuk material PT. PLN terbagi atas material distribusi utama, material distribusi non utama, dan material konstruksi (pembagian terdapat dalam gambar 2). RAB tersebut diperoleh dari biaya-biaya yang masuk dalam SKKI (Surat Kuasa Kerja Investasi) yang disusun oleh seksi distribusi

Berdasarkan penyetujuan tersebut diadakan penunjukan pelaksanaan. Penunjukan pelaksanaan ini diberitahukan secara tertulis, yang mana surat penunjukan ini berlaku sebagai surat perintah kerja untuk memulai semua persiapan, dan hasil penunjukan akan diumumkan kepada peserta.

Setelah SPK/Surat Penunjukan tersebut terbit, maka syarat-syarat administrasi yang harus dipenuhi sebelum pelaksanaan pengadaan material adalah sama dengan syarat administrasi pada sistem penunjukan langsung.

Jangka Waktu Penyerahan Material

Setelah semua syarat dipenuhi, dalam hal jangka waktu pelaksanaan pekerjaan pengadaan material, PT. PLN Cabang Banyuwangi mengharapkan rekanan dapat menyerahkan barang dalam jangka waktu 30 hari kalender, yang terhitung dari tanggal penandatanganan kontrak tidak termasuk waktu yang digunakan oleh petugas untuk memeriksa kualitas barang yang diserahkan oleh rekanan.

Jangka waktu ini dapat diperpanjang jika terjadi hal sebagai berikut

- a. Force Majeure, yaitu suatu kondisi dimana barang tidak dapat diserahkan karena terjadi hal-hal yang diluar kemampuan rekanan seperti banjir, kebakaran dsb
- b. Jika terjadi Force Majeure, maka rekanan diharuskan mengajukan permohonan tertulis dengan disertai lampiran surat keterangan dari yang berwenang mengenai hal Force Majeure
- c. Perpanjangan dapat dilaksanakan atas persetujuan petugas
- d. Waktu pelaksanaan tidak bisa diperpanjang jika, ada kesalahan dari rekanan sendiri dan hari libur, hari raya, dsb.

Tata cara Penyerahan Barang

Setelah jangka waktu ditetapkan, maka rekanan baik yang ditunjuk dengan sistem penunjukan langsung ataupun sistem tender, harus menyerahkan barang sesuai tata cara sebagai berikut :

1. Keseluruhan barang harus diserahkan ke gudang PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Banyuwangi dengan menggunakan Surat Jalan/ Surat Pengantar barang yang dilampiri dengan ;
 - a) Data hasil pengujian contoh dari pabrik atas barang yang diserahkan
 - b) Surat asal usul dari pabrik pembuat (Certificate of Origin) atau agen tunggal yang berdomisili di dalam negeri atas barang yang diserahkan
2. Barang harus sesuai dengan syarat-syarat teknis yang ditentukan, dalam keadaan baik, 100% baru, bebas dari cacat yang kelihatan atau tidak kelihatan, berdasarkan penilaian pemberi tugas
3. Rekanan wajib melakukan pengujian atas barang yang diserahkan dan disaksikan oleh pemberi tugas yang dalam hal ini mewakilkan kepada Direksi pekerjaan dan tim pemeriksa barang, semua biaya yang diperlukan untuk pengujian menjadi tanggungjawab rekanan, untuk barang yang lulus dalam pengujian akan dibuatkan berita acara pemeriksaan barang/TUG. 4
4. Penyerahan barang harus dilakukan dengan bukti penyerahan barang yang ditandatangani oleh pihak pemberi tugas dan rekanan.

Jika barang yang diserahkan tidak sesuai dengan ketentuan dan tata cara penyerahan, maka dapat ditolak oleh pemberi tugas dan rekanan wajib mengganti dengan barang baru yang sesuai dengan syarat yang ditentukan, dan jika penggantian barang tersebut melampaui jangka waktu yang disediakan maka akan dikenai denda

Ketentuan Denda

Berdasarkan uraian diatas, jika ada penyalahgunaan penyerahan dan pengadaan material, akan dikenakan denda dengan ketentuan yakni, jika penyerahan melampaui batas waktu yang ditentukan maka akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (Seperseribu) dari harga kontrak untuk setiap hari keterlambatan dan denda maksimum sebesar 5 % dari nilai kontrak.

Pembayaran Kepada Rekanan dan Pemungutan PPN nya

Setelah adanya penyerahan material sesuai perjanjian dari rekanan kepada PT. PLN (Persero) Cabang Banyuwangi, maka akan diberikan/dilakukan pembayaran, dengan ketentuan pajak sebagai berikut :

1. Semua pajak menjadi beban rekanan
2. PPN 10% dan PPn BM telah diperhitungkan dalam penawaran harga material.

Adapun cara dan syarat pembayaran sebagai berikut :

Pembayaran dilakukan di kantor PT. PLN (Persero) Cabang Banyuwangi, setelah semua barang selesai seluruhnya dan diterima oleh pemberi tugas, kemudian pemberi tugas menerima permintaan pembayaran yang harus disertai syarat sebagai berikut :

1. Kwitansi dan faktur dalam 6 rangkap
2. SSP, Faktur PPN/PPn BM
3. Berita acara serah terima barang
4. Bon penerimaan barang (kode 2) dan berita acara pemeriksaan barang (TUG. 4)
5. Surat Jalan/Surat Pengantar yang telah ditandatangani dan diberi tanggal penerimaan barang oleh petugas gudang penerima.

Setelah semua syarat dilengkapi maka PT. PLN (diwakili pemberi tugas) akan membayarkan sesuai harga perjanjian, yang mana saat pembayaran kepada rekanan

jumlah yang dibayarkan langsung dipotong PPN 10% dari DPP, DPP dihitung dengan rumus “100/110 x nilai tagihan”.

DPP (Dasar pengenaan pajak) yaitu dasar yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak, dimana terdiri atas; harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor dan nilai lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Dalam hal ini, PT. PLN menggunakan DPP dari harga jual atas pengadaan material.

Contoh :

PT. PLN membutuhkan pengadaan material untuk pemasangan JTR dengan harga borongan Rp. 2.142.360, maka jumlah yang harus dibayarkan ke rekanan adalah:

Pembayaran Termin I

Nilai tagihan	: 100% x Rp. 2.142.360	= Rp. 2.142.360
DPP	: 100/110 x Rp. 2.142.360	= Rp. 1.947.600
PPN	: 10% x Rp. 1.947.600	= (Rp. 194.760)
Denda	:	—
Jumlah yang dibayarkan pada rekanan		= Rp. 1.947.600

Pembayaran dan pelaporan PPN atas jasa rekanan bidang pengadaan material

Dalam hal pembayaran kepada rekanan seperti uraian diatas, maka PT. PLN Cabang Banyuwangi selaku wajib pajak badan yang juga bertindak sebagai wajib pungut akan memungut PPN secara langsung dari pembayaran yang diberikan kepada rekanan, sebesar 10% dari DPP. Sedangkan DPP di peroleh dengan rumus “100/110 x nilai tagihan”, sehingga rekanan hanya menerima penghasilan bersih setelah dikurangi PPN 10%. Sedangkan untuk pembayaran PPN ke kantor Pelayanan Pajak dilakukan tiap tanggal 15 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, akan tetapi PT. PLN berusaha untuk membayarkannya sebelum tanggal 15 bulan takwim berikutnya.

Untuk pembayaran PPN ke Kantor Pelayanan Pajak, selama periode tahun 2000 atas pemungutan yang telah dilakukan oleh PT. PLN terhadap jasa rekanan khususnya bidang pengadaan material, adalah sebagai berikut:

No.	Bulan	Gol. Pekerjaan	DPP	PPN
1.	Januari	SLTR	Rp. 4.152.550	Rp. 415.255
2.	April	SLTR	Rp. 3.050.000	Rp. 305.000
3.	Juni	GTT	Rp. 40.350.000	Rp.4.035.050
4.	Agustus	TM	Rp. 1.602.000	Rp. 160.200
5.	September	JTR	Rp. 2.142.360	Rp. 214.236
6.	Oktober	JTR	Rp. 2.150.140	Rp. 215.014
7.	Desember	JTR	Rp. 1.200.500	Rp. 120.050
	Jumlah	DPP	Rp. 54.647.550	
		PPN 10%		Rp 5.464.755

Sumber : Seksi anggaran keuangan PT. PLN (Persero) Cabang Banyuwangi.

Adapun pembayaran/penyetoran PPN tersebut dilakukan dengan menggunakan Bilyet dan Giro yang dibayarkan melalui bank-bank persepsi yang telah ditentukan KPP setempat, untuk PT. PLN Cabang Banyuwangi pembayarannya melalui Bank Mandiri Cabang Banyuwangi.

Untuk pelaporan PPN yang dipungut atas jasa pengadaan material ini, dilaporkan dengan menggunakan bukti setoran yang dibuat oleh PT. PLN sendiri yaitu formulir laporan pemungutan PPN/PPn BM, yang terdiri dari 5 rangkap ; untuk wajib pajak, KPP, Rekanan, Bank Persepsi, arsip wajib pajak. Pelaporan ini dilakukan sebelum tanggal 20 bulan takwim berikutnya, yang dilampiri dengan faktur pajak standart dari rekanan. Jika terlambat melakukan pelaporan akan dikenai sanksi administrasi sebesar Rp. 25. 000 atau denda sebesar 2% perbulan.

3.2 Penilaian terhadap kegiatan perpajakan di PT. PLN Cab.Banyuwangi

PT. PLN Cabang Banyuwangi selaku salah satu perusahaan yang bergerak dibidang "care busines" telah memberikan banyak sumbangan kepada negara lewat pembayaran pajaknya. Berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak, PT. PLN ditetapkan sebagai wajib pajak badan yang juga merangkap sebagai wajib pungut pada setiap kegiatan perpajakan yang ada, dengan NPWP 1001.629.III.627. sejak tanggal 1

Oktober 1995. Sebagai wajib pajak PT. PLN berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan kewajiban perpajakannya, hal ini terbukti dengan adanya staf yang khusus menangani masalah perpajakan PT. PLN, mulai dari pembayaran sampai dengan pelaporannya, yang terdapat pada seksi anggaran dan keuangan.

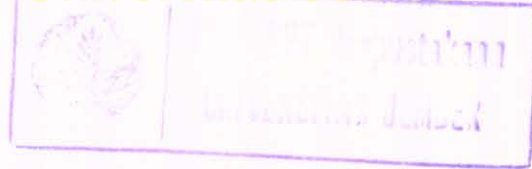
Pelaksanaan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero) Cabang Banyuwangi, penulis nilai telah berjalan secara baik dan teratur. Dimana staf khusus yang menangani masalah perpajakan ini benar-benar memahami bagaimana perhitungan, pembayaran, serta pelaporan pajak terhutanganya, mulai dari pelaksanaan pemotongan pajak atas gaji pegawai, pemungutan PPN atas jasa pengadaan material ataupun atas pembayaran rekening golongan tarif R-3. Ini berarti pelaksanaan kewajiban perpajakan tersebut tidak dikuasakan pada pihak lain, karena telah dilakukan sendiri oleh PT. PLN (Persero) Cabang Banyuwangi. Yang mana berarti mulai dari perhitungan dan pengisian SPT Masa baik PPh ataupun PPN dan SPT Tahunan PPh dilaksanakan sepenuhnya oleh staf yang ada di PT. PLN yaitu seksi anggaran dan keuangan berdasarkan buku petunjuk dan pengetahuan yang diperoleh dari penyuluhan yang diberikan oleh Kantor Penyuluhan Pajak setempat. Sampai saat ini perhitungan SPT baik SPT Tahunan ataupun SPT Masa untuk PPh dan PPN tidak pernah mengalami kelebihan ataupun kekurangan dalam pembayaran pajak terhutanganya, karena semua perhitungan tersebut telah terkomputerisasi, dari PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur, sehingga tinggal memasukkan data-data yang ada di PT. PLN (Persero) Cabang. Dan untuk pembayaran, pelaporan serta penyampaian Surat Pemberitahuan untuk pajak terhutangpun selalu disampaikan tepat waktu, sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan.

Adapun SPT yang disampaikan meliputi SPT Masa PPN, Laporan Pemungutan PPN/PPn BM khusus untuk pemungutan PPN/PPn BM atas pengadaan material, SPT Masa PPh pasal 23, SPT Masa PPh pasal 21 dan 26, SPT Tahunan PPh pasal 21 atas pegawai tetap melalui formulir 1721, semuanya atas nama Suwandoro, BE selaku Bendaharawan/Badan Pemungut.

Gambar 2. Pembagian Material PT. PLN untuk SLTR

JENIS MATERIAL			
No	Material distribusi utama	Material distribusi Non utama	Material Konstuksi
1	AAAC 70 mm ²	Linecape conector 50 – 70/ 70 – 150 mm ²	Free formed grip untuk guy wire 70mm ²
2	AAAC 150 mm ²	Joint steeve 150 mm ²	Glav. Standart steel wire 70 mm ²
3	AAAC 240 mm ²		Equare pipe 75 x 75 x 3,2 x 2000 mm
4	Pin Post Insulator 20 kV lengkap		Mv Guy Insulator (bulat)
5	Suspension Insulator 20 kV lengkap		Arm Tie Pipe ¾ type 750 mm
6	Tiang beton 11 Mtr 350 DaN		Bold & Nut M 16x 140 mm Galv
7	Tiang beton 11 Mtr 200 DaN		Arm Tie Band “6”
8	Tiang beton 9 Mtr 200 DaN		Bold & Nut M 16 x 140 mm + Washer
9			All binding Wire 20 mm ²
10			All Tape 0,4 x 10 mm ²
11			Doible Arm Band 6”
12			Guy Wire Band 6”
13			Thimble/kousen
14			Turn Buckle/spanschreeven ¾ “
15			Wire clips
16			Galv. Gaspjip 0,75 “2 Mtr/pipa pelindung galvanis
17			Anchor Rod ¾ “ x 2500mm/Guy wire Rod
18			Anchor Blok 500 x 500 mm/Guy wire Blok
19			Sturt Arm TM MP 10 – 300 mm
20			Sturt Arm Band 8”
21			Gaspjip Schoeren 2” 2 Mtr/sturt Tie
22			V strap NP (38 x 5 mm)

Sumber : Seksi perencanaan distribusi PT. PLN (Persero) Cabang Banyuwangi.



IV. PENUTUP

Berdasarkan pengertiannya Pajak adalah Iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) tanpa mendapat jasa timbal atau kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan guna memenuhi pembiayaan pengeluaran umum. Sehingga sumber utama dari pembiayaan pembangunan berasal dari pajak, yang juga mempunyai fungsi mengatur (reguler) dan budgeter, oleh karenanya pajak yang dibayarkan baik oleh orang pribadi, perusahaan ataupun jasa, akan mampu menyokong kegiatan pembangunan negara.

PT. PLN Cabang Banyuwangi sebagai salah satu wajib pajak telah memberikan sumbangan kepada negara lewat pajak yang dibayarkan, diantaranya PPh, PPN atau PPn BM, PBB dan lainnya. Kegiatan perpajakan yang dilakukan oleh PT. PLN telah terlaksana dengan baik, khususnya dalam hal pembayaran dan pelaporan PPN atas jasa rekanan bidang pengadaan material. Sebagai perusahaan yang wajib pungut, PT. PLN Cabang Banyuwangi telah membayarkan dan melaporkan pajak yang dipungutnya secara teratur melalui Bank Persepsi yang ditunjuk KPP setempat.

Penulis menyadari, bahwa dalam penulisan laporan ini banyak sekali terdapat kekurangan dan kesalahan. Oleh karenanya kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan guna kesempurnaan penulisan laporan ini. Hanya ungkapan terima kasih yang dapat disampaikan atas izin dan pengetahuan yang telah diberikan oleh PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Banyuwangi.

Daftar Pustaka

- Koentjoroningrat, 1983, *Metodologi Penelitian Masyarakat*, Jakarta, Gramedia.
- Mardiasmo; *Perpajakan Edisi V*, 1997, Yogyakarta, Andi Yogyakarta.
- R. Santoso Brotodihatdjo; *Pengantar Ilmu Pajak cetakan ke - XI*, 1984, Jakarta, PT. Eresco.
- PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Banyuwangi; *Tata Usaha Langganan Manual*, 1999, Surabaya, PT. PLN Surabaya.
- PT. PLN (Persero) Cabang Banyuwangi; *Rencana Kerja dan Syarat*, 2000, Banyuwangi.
- _____, Undang - undang Nomor 9 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan.
- _____, Undang - undang Nomor 11 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

JADWAL KEGIATAN PKN

Tanggal 19 Feruari s/d 20 Maret 20001

Tanggal	Kegiatan
19 – 2 – 2001	Perkenalan dengan karyawan PT. PLN (Persero) Distribusi Jatim Cabang Banyuwangi Menerima penjelasan tentang gambaran umum perusahaan oleh Kepala seksi kepegawaian Bapak Umar Faruk selaku pembimbing PKN di PT. PLN cabang Banyuwangi.
20 – 2 - 2001	Menerima penjelasan dari Bapak wahyudi tentang fungsi pelayanan pelanggan dan kegiatan PT. PLN (persero) Distribusi cabang Banyuwangi. Dilanjutkan dengan perkenalan ke seksi-seksi yang ada.
21 – 2 - 2001	Mempelajari tentang tarif dasar listrik sebagai dasar dan pedoman oleh PT. PLN Distribusi cabang Banyuwangi yang disampaikan oleh Bapak Asyhari.
22 – 2 – 2001	Mempelajari bagaiman cara menghitung biaya – biaya pada rekening listrik. Mempelajari tata usaha langganan sebagai petunjuk di pedoman PT. PLN (persero) Distribusi cabang Banyuwangi.
23 – 2 - 2001	Mencari data tentang sejarah PLN dan hari listrik sera struktur oraganisasi pada seksi kesekretariatan Dn seksi kepegawaian. Membantu memasukkan tagihan rekening pelanggan.
26 – 2 - 2001	Mempelajari kegiatan penagihan rekening untuk tambah daya ataupun gangguan penggunaan listrik. Membantu mencetak rekening.
27 – 2 - 2001	Mempelajari bagaimana syarat dan tata cara pemasangan baru/ tambah daya tenaga listrik.
28 - 2 - 2001	Mempelajari dan mencari data tentang bagaimana sistem pengadaan material PT. PLN.
01 – 3 - 2001	Mempelajari dan mencari data tentang bagaimana sistem pemborongan pemasangan tenaga listrik baru.
02 – 3 - 2001	Mencari data tentang jumlah rekanan di PT. PLN.

	Membantu memasukkan data-data rekanan untuk bulan Februari.
06 – 3 - 2001	Mempelajari bagaimana tata cara SKKI dikeluarkan dan tata cara pemborongan dan pengadaan material dilaksanakan.
07 – 3 - 2001	Mempelajari tentang sistem pembukuan yang digunakan oleh PT. PLN . Membantu memasukkan semua pengeluaran dan pemasukan dengan sistem kas impres.
08 – 3 - 2001	Mempelajari dan membantu menghitung jumlah tagihan rekening yang masuk. Mempelajari perhitungan PPh Pasal 21 atas Pegawai tetap dan penerima honorarium.
09 – 3 - 2001	Mencari data tentang bagaimana pembayaran atas pengadaan material dan pemborongan kepada rekanan.
12 – 3 - 2001	Mempelajari bagaimana sistem pemungutan PPN atas pembayaran kepada rekanan.
13 – 3 - 2001	Mencari data dan mempelajari tentang pembayaran serta pelaporan pajak yang dipungut khususnya atas pengadaan material.
14 – 3 - 2001	Meminta formulir-formulir yang berkaitan dengan pembayaran kepada rekanan dan pembayaran ke KPP khususnya atas PPN yang dipungut karena kegiatan pengadaan material PLN.
15 – 3 - 2001	Meminta formulir SPT Masa PPN dan surat setoran pajak/SSP serta bukti bayar pada bagian keuangan.
16 – 3 - 2001	Kunjungan Bapak Humaidi selaku Supervisor dari fakultas. Mencari data dibagian gudang untu TUG>4 dan Kode 2 sebagai pelengkap data-data yang ada.
19 – 3 - 2001	Berpamitan dengan staf dan karyawan PT. PLN cabang Bayuwangi untuk mengahiri pelaksanaan PKN
20 – 3 - 2001	Menyerahkan daftar penilaian dan kenang – kenangan pada Bapak Umar Faruk selaku pembimbing PKN.

N o m o r : 2197/J25.1.2/PP.9/2001
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Pelaksanaan Kegiatan Magang

14 FEB 2001

Kepada : Yth.. Kepala PT. PLN
Cabang Banyuwangi
Di
BANYUWANGI

Menindak lanjuti Surat Saudara Nomor : 07/07/BWG/2001 tanggal 5 Januari 2001, tentang persetujuan pelaksanaan kegiatan magang Mahasiswa D-III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember di Kantor PLN Cabang Banyuwangi, maka dengan ini kami menugaskan mahasiswa untuk melaksanakan magang (surat tugas terlampir).

Selanjutnya pengaturan jadwal dan pelaksanaan magang sepenuhnya kami serahkan kepada Saudara sesuai dengan tata tertib dan disiplin kerja yang berlaku. Kami berharap selama melaksanakan magang, mahasiswa diberi kesempatan untuk praktek.

Demikian atas bantuan dan kerjasama yang baik kami sampaikan terima kasih.



Drs. H. Moch. Toerki
NIP. 130 524 832.



Surat Tugas

Nomer : 508 / DS.1.2 / PP.9 / 2001

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan nama-nama dibawah ini :

No	N a m a	NIM	Keterangan
01	Ricky Y. Saerang	98 - 1092	Ketua
02	Herman Susanto	98 - 1016	Wakil Ketua
03	Hidloh Fikriyah	98 - 1046	Anggota
04	Tila Sulistyowati	98 - 1106	Anggota
05	Indah Lestari	98 - 1032	Anggota
06	Adj Mujianto	98 - 1060	Anggota

Untuk mengikuti Program Magang di PT Perusahaan Listrik Negara Banyuwangi selama 1 bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesai. Selama melaksanakan kegiatan magang diwajibkan mengikuti tata tertib dan disiplin kerja yang berlaku di tempat Magang.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Jember, 14 FEB 2001

Dekan



Moch. Toerki

NIP. 150 524 832

Kulon 19/8/01

Rpp. Humasiani

Bakir Permana Jember 16/8/01

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
 PROGRAM STUDI D-III PERPAJAKAN/PARIWISATA
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

DAFTAR KEGIATAN KONSULTASI / BIMBINGAN LAPORAN AKHIR

Nama Mahasiswa : Hifdoh Fikriyah

Nomor Induk Mahasiswa : 980903101048

Alamat Mahasiswa : Jl. Jawa VI/74

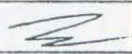
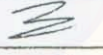


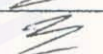


Jurusan : Ilmu Administrasi

Program Studi : D III Perpajakan

Judul Laporan Akhir : P rosedur Pengenaan PPN atas Jasa Rekanan
Bidang P engadaan Material di PT. PLN
(Persero) Distribusi Jatim Cabang Banyuwangi.

Dosen Pembimbing : Drs. Bb Krebet B,MS

Asisten Pembimbing : _____

No	Hari/Tanggal	Jam	Uraian Kegiatan	Ttd.Pemb/Ass.
1.	Jum'at/6-4-01	09.00	Revisi K ta	
2.			Revisi	
3.	Senin/9-04-01	19.00	AGG + revisi DAD I	
4.	Kamis/12-4-01	09.00	revisi DAD I, II	
5.	Senin/15-4-01	19.00	revisi DAD III	
6.	Senin/23-4-01	19.00	revisi DAD III	
7.	Rabu/25-04-01	09.00	Revisi DAD IV	
8.	Jum'at/27-4-01	19.00	AGG DAD I, II	
9.			III, IV	
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				

Catatan : 1. Dibawa mahasiswa yang bersangkutan pada setiap konsultasi
 2. Ditanda tangani oleh Dosen /Ass.Pembimbing Laporan Akhir
 3. Diserahkan kepada Ketua Jurusan /Pemb. Laporan Akhir setelah konsultasi.



NILAI PRAKTEK KERJA NYATA DI TEMPAT KERJA

TAHUN 2001

NAMA : Hifdoh Fikriyah
NIM : 980903101048
TEMPAT PRAKTEK KERJA : PT. PLN (Persero) Distribusi JATIM
Cabang Banyuwangi
BIDANG TUGAS : Bagian Perencanaan Distribusi
ALAMAT : Jalan Nusantara No. 1 Banyuwangi

NO	PENILAIAN ATAS DASAR	NILAI				KETERANGAN
		A	B	C	D	
1.	Kelakuan dan disiplin		7,6			
2.	Inisiatif dan Kreatifitas		7,5			
3.	Hasil kerja praktek		7,5			
4.	Hubungan dalam lingkungan kerja		7,6			

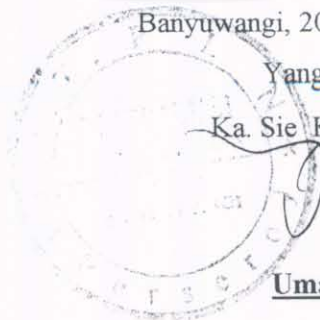
Keterangan : A = Sangat Baik : 8,0 - 10
B = Baik : 6,6 - 7,9
C = Cukup : 5,8 - 6,5
D = Kurang : 4,5 - 5,7

Banyuwangi, 20 Maret 2001

Yang menilai

Ka. Sie Kepegawaian,


Umar Faruk



PT PLN (PERSERO)
DISTRIBUSI JAWA TIMUR
CABANG BANYUWANGI

Jalan Nusantara No.1 Banyuwangi
Telp. : (0333) 421441,421442
Kotak Pos :

Telex :
Faximile : 421448

Alamat Kawat : PLN BWI

Nomor : M.048/PK/2000/JTR
Lampiran : -
Perihal : **PENUNJUKAN KERJA**

Banyuwangi, 26 September 2000

KEPADA
CV. "SURYA TEHNIK"
JI LETJEN S PARMAN No.16
DI
JEMBER

Dengan ini kami berharap agar hendaknya saudara melaksanakan pekerjaan pekerjaan pemborongan sebagai berikut :

1. Jenis pekerjaan : PEMAS. JTR = 0,491 Kms. u/ MENUNJANG PEMAS. SR 3 PH.
PASANG BARU DAYA 23 KVA / I2
Lokasi : Ds. SUKOWIDI - BANYUWANGI A/N. WAYAN SUKRAYASA
2. Atas dasar : SKK. BP.01 - 50/A/01/BWG/2000
TAHUN ANGGARAN 2000
3. Harga borongan : Rp. 2,142,360,-
PPN 10 % : Rp. 214,236,-
Total : Rp. 2,356,596,- dibulatkan 2,357,000,-
4. Jangka waktu penyelesaian pekerjaan pemborongan tsb. diatas selama 14 (Empat -
belas) hari kalender terhitung mulai surat penunjukan tsb. ditanda tangan/pekerjaan
tersebut harus dapat diserahkan terimakasih selambat-lambatnya pada tgl. 10-10-2000
5. Perpanjangan waktu tidak diberikan untuk keterlambatan - keterlambatan yang
disebabkan oleh cuaca buruk, hujan, keadaan tanah yang tidak baik, kekurangan tenaga
kegagalan pemborong menyediakan material dan peralatan untuk menjamin
pengadaanya pada saat diperlukan dan hal-hal yang disebabkan oleh kecerobohan
atau kealpaan pemborong dalam melaksanakan pekerjaan.
6. Pengajuan laporan selesai 100 % harus dilampiri Berita Acara Serah Terima Pekerjaan
7. Pembayaran akan dilaksanakan oleh PT. PLN (Persero) Cabang Banyuwangi melalui
rekening saudara No. 700 025.01047.2.01.0 PT. Bank Mandiri (Ex. BDN) Cab. Jember.
8. Pembayaran temijn dapat dilakukan sebesar 100% apabila fisik pekerjaan selesai 100%
9. Keterlambatan penyerahan pekerjaan untuk setiap harinya dikenakan denda
1 (persenibu) dari nilai kontrak, maksimum 5 %

Selanjutnya bilamana saudara menyetujui melaksanakan pemborongan pekerjaan diatas,
saudara supaya menanda tangani diatas meteral Rp. 6.000,- sebagai tanda menyetujui.

Demikian harap menjadikan maklum serta untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Menyetujui/sanggup melaksanakan,
CV. "SURYA TEHNIK"



JANSEN MADE KOPI
Direktur

KEPALA
SUYANDORO, BE.

CAT & RR)

Jml. k... 2000

PT. PLN (PERSERO)
DISTRIBUSI JAWA TIMUR
CABANG BANYUWANGI

SURAT PERINTAH KERJA

No. 05.P/TU/BWG/VI-13/2000

Pada hari Selasa tanggal Tiga belas bulan Juni tahun Dua ribu, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **SUWANDORO, BE** : Selaku Kepala PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Banyuwangi yang berkedudukan di Jl. Nusantara No. 1 Banyuwangi selanjutnya disebut : PIHAK KESATU.
2. **AGUS MUSTIANTO** : Selaku Ketua KPN " KOPERLIN " yang berkedudukan di Jl. Nusantara No. 01 Banyuwangi yang selanjutnya disebut : PIHAK KEDUA.

Berdasarkan : - Surat Permintaan Penawaran No. 05.P/SP/PENA/PALM/2000 tanggal 05 Juni 2000.
- Surat Penawaran No. 065/KOPERLIN/BWG/VI/2000 tanggal 12 Juni 2000.
- Surat Pesanan No. 05.P/BWG/VI-13/2000 tanggal 13 Juni 2000.

Maka dengan ini PIHAK KESATU menunjuk PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima baik penunjukan dari PIHAK KESATU untuk melaksanakan pekerjaan :

PENGADAAN MATERIAL UNTUK PENDUKUNG PEMELIHARAAN GTT & GANGGUAN TRIWULAN II TAHUN 2000.

Atas dasar : SKKO/P.001L/BWG/02-I/2000 dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1.

Pekerjaan tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan – ketentuan yang tercantum dalam RKS nomor : 001/RKS/BWG/01/2000 dan risalah penjelasan kantor tanggal 02 Juni 2000.

Pasal 2.

Harga borongan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak adalah sebesar : Rp. 43.329.480,- (Empat puluh tiga juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh rupiah) sudah termasuk PPN 10 %.

Pasal 3.

Waktu penyerahan barang harus dilaksanakan pada setiap hari kerja selambat – lambatnya tanggal : 26 Juni 2000.

Pasal 4.

Pembayaran tidak diberikan uang muka, segera dibayar setelah barang – barang di terima PT. PLN (Persero) Distribusi jatim Cabang Banyuwangi melalui rekening Saudara No. 091.046315.001 pada Bank BNI 46 Cabang Banyuwangi.

Pasal 5.

Barang harus di periksa di Gudang Rekanan / Pemborong sebelum diterima di Gudang PT. PLN (Persero) Distribusi Jatim Cabang Banyuwangi.

Pasal 6.

Keterlambatan penyerahan barang akan dikenakan suatu denda terhadap terjadinya kelambatan sebesar : Rp. 43.329,- (Empat puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah) setiap hari keterlambatan penyerahan barang dengan batas maximum 5 %.

Pasal 7.

Setelah batas waktu maximum keterlambatan ditambah 7 hari kalender rekanan masih belum menyerahkan barang, maka PLN memutuskan secara sepihak.

Pasal 8.

Bea meterai menjadi tanggung jawab Pihak Kedua termasuk bea meterai untuk salinannya.

Pasal 9.

Surat Perintah Kerja ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) masing – masing mempunyai kekuatan yang sama dan berlaku sejak ditanda tangani oleh kedua belah pihak.

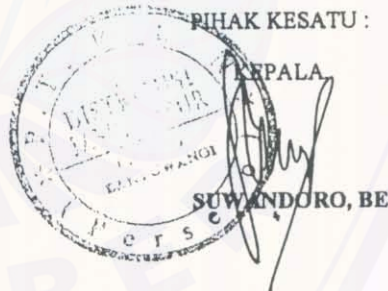
PIHAK KEDUA :

KPN "KOPERLIN"



PIHAK KESATU :

KEPALA



PT. PLN (P E R S E R O)
DISTRIBUSI JAWA-TIMUR
CABANG BANYUWANGI
Jl. Nusantara No. 01
BANYUWANGI

Telepon : 421441, 42442

Telex :

Kotak pos :

Kawat :

Facsimile : 421446

Kode Pos :

Bank : Bank BNI 1946

Bank Bumi Daya

Bank Central.A

Bank Buana Ind.

Nomor : 05.P/SP/PENA/PKIM/2000.

Surat Sdr No :-

Lampiran :-

Perihal : PERMINTAAN PENAWARAN HARGA

Banyuwangi, 05 - Juni - 2000.

Kepada Yth.

KPN " KOPERLIN "

Jl. Nusantara

NO. 01

B A N Y U W A N G I.

Dengan ini kami mengharapkan kesediaan Saudara untuk mengajukan penawaran harga Pengadaan material untuk pendukung Pemeliharaan GTT serta gangguan Triwulan II Tahun Anggaran 2000 PT.PLN (Persero) Cabang Banyuwangi atas dasar : SKKO/P.001L/BWG/02 -I/2000.

1. Surat Penawaran harga dilampiri dengan :

1.1. Perincian dan harga Penawaran.

1.2. Pada amplop penawaran sebelah kiri atas dicantumkan Penawaran No. :
05.P/SP/PENA/PKIM/2000.

2. Surat Penawaran Harga dan lampirannya dikirim selambat-lambatnya tanggal :
12 Juni 2000.

3. Penjelasan akan diadakan pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 06 Juni 2000

Jam : 09.00 W.i.b

Untuk diperhatikan, atas kesediaan Saudara kami ucapkan terima kasih.





KOPKAR " KOPERLIN "

PT. PLN (PERSERO)
CABANG BANYUWANGI

Jl. Nusantara No. 1 Telp. 421442 Banyuwangi

Badan Hukum : Nomor : 7418/BH/II/1992 Tanggal 29 September 1992

Bank BNI '46 BWI
BPD BWI

Nomor : 065/KOPERLIN/BWG/VI/2000

Banyuwangi, 12 Juni 2000

Lampiran : Sesuai isi surat

Perihal : Penawaran Harga

Kepada Yth.
Kepala PT PLN (Persero)
Cabang Banyuwangi
di
BANYUWANGI

Menunjuk surat PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Banyuwangi No. : 05.P/SP/PENA/PALM/2000 tanggal 5 Juni 2000 perihal Permintaan Penawaran Harga Pengadaan Material untuk pendukung Pemeliharaan GTT serta Gangguan, maka dengan ini kami mengajukan Penawaran Harga sesuai perincian biaya material terlampir.

Demikian disampaikan untuk menjadikan periksa dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



REKAPITULASI - RAB

ATAS DASAR : SKK.BP.01-50/A/01/BWG/2000

NO	JENIS PEKERJAAN	SATUAN	VOL.	JUMLAH RAB (Rp)
1	PEMASANGAN JTR UNTUK MENUNJANG PASANG BARU SR 3 PHASA DAYA 23 KVA TARIF I2 LOKASI DS. SUKOWI DI An. WAYAN SUKRAYASA (CV. CITRA KARYA MANDIRI) WIL.KERJA PT. PLN (PERSERO) CABANG BANYUWANGI.	KMS	0,491	2.142.360
		Jumlah.	Rp.	2.142.360
		PPN 10 %	Rp.	214.236
		Jumlah Total	Rp.	2.356.596
		Dibulatkan	Rp.	2.357.000

Banyuwangi, 19 SEP 2000

Diketahui / Disetujui :



Diperiksa :

K BAGKONDIS,

Ir. SARDJONO

RENCANA BIAYA PEMASANGAN JTR

Sepanjang : 0,276 Kms Untuk melayani P.B Daya 23 KVA tarif IZ
 Lokasi Ds. Sukowidi An. Wayan Sukrayasa Banyuwangi.

Alas dasar : SKK.BP.01 - 31/BWG/A/01/2000

NO	URAIAN MATERIAL	SAT	JUMLAH BIAYA INVESTASI			JUMLAH BIAYA DIBORONGKAN			JUMLAH BIAYA	
			VOL	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH BIAYA	MATERIAL	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)		JUMLAH BIAYA
				MATERIAL	JASA		MATERIAL	JASA		
7	GRUNDING Dasar Ground Rod 16 mm2 - 1,5 mtr + clamp AAC 50 mm2 Line tap type CCO 5T3 Cable Shoes/Lug Al/Cu type SKAT 4 LI Stainless steel strap 20x0,7 Yokas+ Link	Set bh mt bh bh mt bh	1 1 9 1 1 2,4 3	pin pin pin pla pin pin pin				12.020	12.020	12.020
III	Bund. Conductor 4x25 mm2 (Dibongkar) Bund. Conductor 3x50 + 1x35 mm2	Mt Mt	198 500	Bkr/Retur Ps/pin			330 350		65.340 175.000	65.340 175.000
IV	TRANSFORMATOR Bongkar Trafo 3 Ph 20 kV 220/380V 25KVA Pasang Trafo 3 Ph 20 kV 220/380V 50KVA	Bh Bh	1 1	pin pin			54.000 135.000		54.000 135.000	54.000 135.000
				Sub Jumlah						Rp 2.022.360
				Transfortasi						Rp 120.000
				PPN 10 %						Rp 214.235
				Jumlah Total						Rp 2.356.596
				Dibulatkan						Rp 2.357.000

Libep-rab

Banyuwangi, 19 September 2000

Diperiksa :

K BAGKONDIS,



K. SARDJONO

SUMBER JAYA

R A

PHONE NO. : 031 5466806

Jun. 09 2000 12:50PM P1

SURNA SURYA JAYA

Surabaya - Alat Tulis Kantor, Barang Cetak, Part Elektrikal, Survey, Laboratorium, dll.
Tembok Gedé III/12 Telp. (031) 515230
Surabaya
Jl. Grayu No. 6 Malang

Surabaya, 30 Maret 1920

Tuan PT. PLN (Persero) Distribusi
Toko
Jawa Timur, Cabang Pemekasan
Jl. Jokotole - Pemekasan

SURAT JALAN No.

Faktur menyusul

Bersama ini kendaraan No. kami ada kirim barang* tersebut di bawah ini

Banyaknya	NAMA BARANG
100 Bh ✓	NH Fuse 40A IZLAKE
150 BH ✓	NH Fuse 80A
180 Bh ✓	NH Fuse 125A (SP = 150) + 30
70 Bh ✓	NH Fuse 160A
100 Bh ✓	NH Fuse 200A
90 Bh ✓	NH Fuse 250A (- 60)

Tanda tangan sipenerima,

[Handwritten signature] 20/3/2000



SURNA SURYA JAYA

SURABAYA, 22 MEI 2000

**Surat Jalan
Faktur Menyusul**

No.:

Kepada Tuan: PT. PLN (PERSERO)
Toko: CABANG KEDIRI
JL. BASUKI RAHMAD 3-7
KEDIRI

Bersama ini kendaraan No. kami ada kirim barang-barang tersebut dibawah ini.

Banyaknya	NAMA BARANG
40 BH	NH FUSE 100A IZLAKE
150 BH	NH FUSE 160A
150 BH	NH FUSE 200A
100 BH	NH FUSE 250A
75 BH	NH FUSE 300A

Tanda tangan sipenerima,

[Handwritten signature]

Hormat kami,

[Handwritten signature]

UP = BP MADE
PANEL 9 BH kami kirim ekspedisi dan Bate HT kami masukan ada di salah satu dalam PANEL
Pipa sebanyak 522 Bh kami kirimkan hari Senin

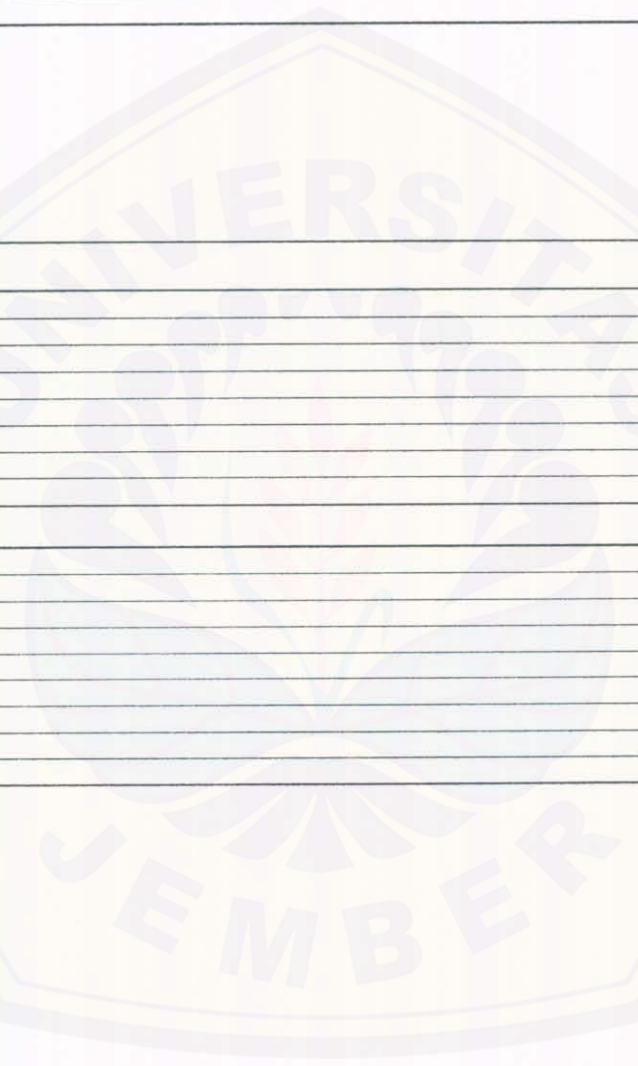
KODE 2

**PT. PLN (PERSERO) DISTRIBUSI JAWA TIMUR
BON PENERIMAAN BARANG-BARANG PESANAN**

6. Untuk T. U. K. G.

No 101955

Menurut Surat Pesanan No. :				REKAMAN :				GUDANG :					
Menurut Formulir Kode 4		Tgl. Bln. Thn.	Kode	Nomor Normalisasi		Sln.	Banyaknya	V	Keterangan	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)	Kode Jurnal :	
Nomor	10 Tanggal	11 16	17	41	42	43	50	51		52		21	24 25 33
No. urut	Nama Barang (ditulis selengkap-lengkapnya)	Diterima Tanggal		34									
Nota Nomor :		Perintah Kerja :		Fungsi :								Jumlah :	
Pembelian di tempat, lihat faktur / Bukti Kas.		Kepala Gudang		Diperiksa oleh,		Kepala Gudang						Kepala Gudang	
No. :		(.....)	



PT.PLN(PERSERO)
DISTRIBUSI JAWA TIMUR
CABANG BANYUWANGI

BERITA ACARA PEMBAYARAN

No.

Pada hari ini KAMIS tanggal satu MARET tahun dua ribu satu yang bertanda tangan dibawah ini :

SALIKAN Ka.Bag.Administrasi PT.PLN(PERSERO) Distr.Jatim Cab.Banyuwangi.

Setelah mengadakan pemeriksaan/mempelajari perkembangan pelaksanaan pemborongan pekerjaan :

S K K O :
Yang dikerjakan :
Alamat :
Disyahkan dengan surat perjanjian/Surat Perintah Kerja (SPK) Addendum :

S P K :
Tanggal :
Biaya / Nilai : Rp.
Berita acara pemeriksaan phisik pekerjaan :
Berita acara penyerahan hasil pekerjaan :

Maka pada Rekanan tersebut diatas kami setuju mengajukan penagihan atas pembayaran : sebesar 100 %

Dari harga borongan, sesuai dengan surat permintaan pembayaran nomor : tanggal :

Dengan rincian sebagai berikut :

Harga Borongan		: Rp.	0
Pembayaran Termin I = 100 % x Rp.		0 : Rp.	0
P P N	100 / 110 x Rp.	0 : Rp.	0
P P H	1,5 % x Rp.	0 : Rp.	0
D E N D A	Rp.	0 : Rp.	0
Dibayarkan		<u>Rp.</u>	<u>0</u>
S i s a		Rp.	0
Pembayaran Termin II 5 % x Rp.		<u>Rp.</u>	<u>0</u>
S i s a		<u>Rp.</u>	<u>0</u>

Terbilang : *
* *
* **Rupiah** *****

Setuju

Kami yang bertanda tangan

Mengetahui

*

**

**

0.00

0

SKKO :	0			
SPK :	0	Nilai Borongan	Rp.	0
NILAI TAGIHAN	100 % x	Rp.	0 Rp.	0
PPN	100/110 x	Rp.	0 Rp.	0
PPH	1,5 % x	Rp.	0 Rp.	0
DENDA			Rp.	0
DIBAYARKAN			<u>Rp.</u>	<u>0</u>

Banyuwangi,

BUKTI PEMBAYARAN

2.024

*

**

**

0

PUNGUTAN PPN & PPH ATAS DASAR

0

SKKO :	0
SPK :	0
PPN Rp.	0
PPH Rp.	0
DENDA Rp.	0

Banyuwangi,

BUKTI PENERIMAAN.

KEPADA

YTH. KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK
BANYUWANGI
JL. ADI SUCIPTO no.
BANYUWANGI

LAPORAN PUNGUTAN PPN/PPn BM. BENDAHARAWAN/BADAN PEMUNGUT



BULAN : FEBRUARI 2001

URAIAN	JUMLAH FAKTUR PAJAK TERLAMPIR	PPN/PPn. BM yang dipungut	
		PPN	PPn. BM
Bulan ini	Lembar	Rp	Rp
Bulan sebelumnya	Lembar	Rp	Rp
s/d Bulan ini	Lembar	Rp	Rp

Banyuwangi,
BENDAHARAWAN

NPWP : 1.001.629.3.627

SUWANDORO BE

No. Faktur Penjualan / Kontrak / Order *) :		FAKTUR PAJAK STANDAR		No. Seri :	
PENGUSAHA KENA PAJAK :		 <div style="border: 1px solid purple; padding: 5px; display: inline-block;"> UNIVERSITAS JEMBER </div>			
Nama :					
Alamat :					
NPWP : <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>					
No. Pengukuhan PKP : No.		Tanggal :			
Tanggal Penyerahan / Pembayaran *) :					
PEMBELI BKP / PENERIMA JKP :					
Nama :					
Alamat :					
NPWP : <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>					
No. Urut	Nama Barang Kena Pajak / Jasa kena Pajak	Kuantum	Harga Satuan (Rp.)	Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termijn (Rp.)	
Jumlah Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termijn *)					
Dikurangi potongan harga					
Dikurangi Uang muka yang telah diterima					
Dasar Pengenaan Pajak					
PPN = 10 % x Dasar Pengenaan Pajak					
TARIF	D P P	P P n B M			
..... %	Rp.	Rp.			
..... %	Rp.	Rp.			
..... %	Rp.	Rp.			
..... %	Rp.	Rp.			
TOTAL		Rp.			
			19.....  Nema) Jabatan	

*) Coret yang tidak perlu